

BAB III

LAHIRNYA POLITIEKE EKONOMISCHE BOND (PEB)

A. Berdirinya PEB

Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun 1918 dan 1919 mendorong terjadinya polarisasi, dan demikian memperkuat tuntutan golongan konservatif agar pemerintah melakukan intervensi politik. Keresahan masyarakat tampak menonjol, ketika penanaman padi banyak mengalami gagal panen dan pelayaran lumpuh sebagai akibat perang.⁷³ Kondisi politik dalam negeri sendiri semakin memburuk bagi pemerintah Hindia Belanda. Hal itu dikarenakan organisasi politik pribumi bergerak ke arah radikal. Pada kongres SI tahun 1918, para pemimpin SI sayap kiri memperoleh kemajuan yang mengesankan, dan SI jauh menjadi lebih radikal.⁷⁴ Kritik-kritik pedas muncul dalam *Volksraad* dan pada akhir Oktober 1918 terjadi insiden anti Cina di Kudus.⁷⁵

Akibat situasi yang semakin memburuk, Gubernur Jendral van Limburg Stirum di depan *Volksraad* berbicara tentang masa penuh pergolakan dan keresahan yang memaksanya mengucapkan janji-janji palsu yang kemudian dikenal dengan

⁷³ Heather Sutherland. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Terj. Drs. Sunarto Jakarta: Sinar Harapan.1983. hal. 161

⁷⁴ *Ibid.* hal. 161

⁷⁵ Elsbeth Locher Scholten. *Op. Cit.*, hal. 83.

Janji November atau *November Beloften*.⁷⁶ Isi singkat janji Gubernur Van Limburg

Stirum tersebut adalah:

“Segala aturan yang kurang baik sebagaimana telah diucapkannya di muka sidang-sidang volksraad akan diiadakan. Dalam usaha itu hendak dibentuk suatu panitia, yang akan melakukan pemeriksaan tentang keadaan dan perhubungan-perhubungan di dunia gula. Kepada menteri jajahan telah disampaikan permintaan supaya bunyi pasal 111 *Regeeringsregelement* yang membatasi hak-hak berkumpul dan bersidang ditinjau kembali. Aturan memberi makan kepada tentara, hal ihwal didalam tanksi, hal tentara yang tidak memuaskan, dan hal hukum tentara yang pincang, akan diperbaiki. Meskipun pemerintah hanya dengan hati enggan menggunakan hak-haknya yang tidak terbatas (*exorbitant rechten*), ia terpaksa melakukan kehendak pasal 45 R.R (pembuangan, internering, atau externering) kepada semua orang, yang terus-menerus berusaha hendak melemahkan alat-alat kekuasaan, apalagi pada musim genting, meskipun telah berulang-ulang diperingatkan”.⁷⁷

Inti dari janji November tersebut adalah Gubernur Jendral Van Limburg Stirum berbicara mengenai haluan baru, perubahan hubungan, mempercepat perkembangan dan kebutuhan akan perubahan sosial serta kesejahteraan yang lebih besar. Ia membentuk sebuah komisi untuk memberi nasehat mengenai perubahan konstitusi Hindia-Belanda.⁷⁸ Dalam janji November itu pada pokoknya Van Limburg Stirum membayangkan akan diikutsertakannya rakyat pribumi sebanyak-banyaknya dalam pemerintahan Hindia-Belanda yang akan diberi lebih banyak wewenang mengatur rumah tangganya sendiri.⁷⁹

⁷⁶ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 13. Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1990.hal. 315.

Dalam Elsbeth Locher Scholten, *Etika yang Berkeping-keping*. Dijelaskan secara lengkap mengenai janji November dari hal 89-102. Heather Sutherland. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.1983. hal.161 menyebut juga janji November dengan deklarasi November. Dijelaskan bahwa Deklarasi November lahir dari memburuknya kondisi di Eropa. Pada masa tersebut negara Belanda dikuasai oleh Jerman dalam Perang Dunia I (1914-1918).

⁷⁷ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 13. Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1990.hal. 315

⁷⁸ Heather Sutherland. *Op. Cit*, hal.161

⁷⁹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 13. Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1990.hal.315

Reaksi atas janji November tersebut bagi golongan pribumi adalah dengan lahirnya mosi tanggal 25 November 1918 oleh Tjokroaminoto.⁸⁰ Mosi tersebut menginginkan agar adanya perubahan besar dalam pemerintahan dalam negeri, harus adanya parlemen, dan adanya kerjasama antar pemerintah dengan perhimpunan politik dalam negeri.⁸¹ Mosi itu ditandatangani oleh Sastrowidjono, Dwidjosewojo, Cramer, Tjipto, Radjiman, Teeuwen, A. Muis dan Thayeb.

Reaksi di kalangan Belanda adalah dengan mendirikan partai politik. Politieke Economische Bond didirikan pada bulan Januari 1919. Anggota partai ini terdiri dari golongan pengusaha besar, tokoh perekonomian dan golongan eksekutif Belanda. Partai ini muncul sebagai manifestasi rasa kegelisahan yang mendalam di kalangan orang-orang Belanda akibat makin gencarnya kaum pergerakan menuntut perbaikan di segala bidang kehidupan dan kenegaraan bagi rakyat terjajah.⁸²

Dijelaskan pula dalam buku A. K. Pringgodigdo, *Politieke Economische Bond* (PEB) didirikan pada tanggal 25 Januari 1919 sebagai reaksi terhadap tindakan-tindakan dan haluan umum dari pemerintah Hindia Belanda yang dipandang terlalu maju, terlalu etis. PEB didirikan oleh A. J. N. Engelenberg merupakan partai politik campuran yang menginginkan Indonesia tetap berada dalam ikatan kerajaan Belanda dan diberikan pemerintahan sendiri yang seluas-luasnya.⁸³

⁸⁰ *Ibid.* hal. 315

⁸¹ *Ibid.* hal. 315

⁸² *Ibid.* hal. 315

⁸³ A. K Pringgodigdo. *Op. Cit.* hal. 15

Engelenberg sebagai pendiri dan pemimpin PEB merupakan mantan Residen Bangka dan sekitarnya.⁸⁴ Tugasnya adalah mengadakan kunjungan keliling Hindia Belanda dan membuat laporan tentang gerakan Sarekat Islam (SI).⁸⁵ Ia juga pernah menjabat sebagai Aspiran Kontrolir di Cirebon.⁸⁶ Selain itu ia juga merupakan salah satu tokoh kaum Etisi, tokoh yang memperjuangkan politik etis di Hindia Belanda.⁸⁷

Dalam *orgaan* PEB diberitakan bahwa PEB adalah suatu organisasi yang kuat, di dalamnya terdapat semua orang dari etnis apa pun dan agama apa pun juga yang tetap berada di Hindia Belanda bisa dilibatkan untuk menghadapi pergolakan revolusioner.⁸⁸

Partai tersebut oleh kaum pergerakan dicurigai didirikan untuk mendukung kepentingan kaum kapitalis Belanda. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Abdul Muis dalam harian *Neratja*, 16 Juli 1921 terdapat atikel yang menjelaskan tentang hubungan PEB dengan sindikat gula. Isi dari artikel tersebut antara lain:⁸⁹

“Hoor!! Barangkali toean Engelenberg sudah loepa, tersiarnya satoe Circularir *rahasia besar* dari Suikersyndicaat, jang ditoelis pada tanggal 27 Agustus 1919 memakai No. S 4043, terhadap kepada: “*Toean-toean chef dari kantor-kantor Bank dan sekalian wakil-wakilnja daripada radja-radja fabriek goela*”.

....Dalam soerat saja (Engelenberg) “sangat rahasia” tertanggal 29 Juli 1919 No. S 3495, adalah saja membangoenkan hati toean-toean, boeat menoenjang dengan oeng akan koempoelan *Politieke Economische Bond* jang baroe didirikan, soepaja memberi sempit pada bond itoe akan mentjapai maksoednja.”

⁸⁴ George D Larson. *Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*. Terj. A. B. Lopian, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1989. hal. 61.

⁸⁵ A. P. E. Korver. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*. Jakarta: PT Temprint. 1985, hal. 9

⁸⁶ Akira Nagazumi. *The Dawn of Indonesian Nasionalism: The Early Year of Boedi Oetomo. 1908-1918*. Tokyo: Institute of Developing Economies. 1972. hal.180

⁸⁷ *Ibid.* hal. 181

⁸⁸ *Orgaan PEB*, Rabu, 9 Juni 1920. hal. 2

⁸⁹ *Neratja*, 16 Juli 1921. Artikel ditulis oleh Abdoel Moeis berdasarkan surat rahasia dari *suikersyndicaat* tertanggal 27 Agustus 1919 No. S 4043. Suikersyndicaat merupakan gabungan dari beberapa kongsi perusahaan gula.

Dijelaskan bahwa pemimpin PEB Engelenberg, meminta dukungan dana kepada *suikersyndicaat* (sindikata gula) untuk membiayai kegiatan PEB. Bahkan dalam *Sinar Hindia* diberitakan bahwa untuk mencari dukungan, PEB suka mendermakan uang kepada masyarakat karena PEB mendapatkan bantuan besar dari kaum pemilik modal.⁹⁰

Dalam *Indische Gids* dijelaskan pula bahwa PEB juga memiliki hubungan dengan pabrik gula selaku pemilik modal. Dalam pemberitaannya juga ditemukan tembusan surat edaran rahasia yang telah dikirim oleh ketua sindikat pabrik gula kepada para pengelola lembaga bank dan para wakil lain dari para pemilik pabrik gula dan di mana atas bantuan keuangan ditekankan kepada PEB, dengan tujuan untuk menyiapkan organisasi ini dengan mengangkat para juru propaganda yang diperlukan.⁹¹

Sedangkan dalam tulisan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah terdapat artikel yang juga menjelaskan hubungan PEB dengan *suikersyndicaat*. PEB, sebuah organisasi yang dibentuk oleh persatuan pabrik gula yang dimiliki Belanda. Tujuan PEB ialah untuk mengatur koordinasi dan kerjasama antar-pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam produksi, pemasaran, dan juga dalam aspek sosial-budaya yang ada hubungannya dengan politik-ekonomi pabrik gula.⁹²

⁹⁰ *Sinar Hindia*, 4 Nov 1920

⁹¹ *De Indische Gids*, tahun 1920, hal.544-545

⁹² www.muhammadiyah.com diunduh pada tanggal 27 November 2007

Demikian juga dengan organisasi Eropa seperti *Vrijzinnige Bond* pun juga mengetahui bahwa PEB mendapatkan dana dari perusahaan dan pabrik industri gula. Para pemilik perusahaan itu memberikan dana kepada PEB untuk dapat memperjuangkan keinginan mereka, yaitu agar kenaikan biaya produksi tidak terjadi dan pemberian upah rendah kepada para pekerja, serta sewa tanah yang rendah. Dengan demikian PEB bersifat konservatif dikarenakan ingin tetap mempertahankan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda.⁹³

Sebagai sebuah organisasi politik, nama PEB dipilih karena mempunyai arti sebagai landasan perjuangan partai ini. Dalam orgaan PEB dijelaskan mengenai arti dari nama *Politieke Economische Bond*.⁹⁴

a. *Bond*

Organisasi atau *Bond* bisa berasal dari kata "*binden*" seperti "*band*" dan "*bundel*" dan pada mulanya hanya menunjuk pada persatuan bersama, penggabungan dari semua unsur yang sejenis atau tidak sejenis. *Bond* berbeda dengan organisasi. Pada organisasi hanya terletak keputusan untuk bergabung, berkumpul, dan hanya bersifat sesaat. Sedangkan *Bond*, selain dari bergabung dan berkumpul, juga terdapat tujuan jangka panjang untuk masa depan. *Bond* berakar dari ikatan para anggotanya yang melahirkan kebersamaan. Dalam *bond* terdapat persatuan dan kepercayaan terpadu dari para pendirinya maupun anggotanya.

⁹³ *Orgaan PEB*, 15 Desember 1920, hal. 356-357

⁹⁴ *Orgaan PEB*, 26 Juli 1923, hal. 429-432

b. Politik

Politik adalah sarana untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Dengan berpolitik aspirasi sebagai warga negara akan terwujud. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan terpenuhi.

Menurut PEB, negara terdiri atas tiga unsur penting, yaitu; hukum, kekuasaan, dan hak. Untuk menciptakan kesejahteraan, negara harus memiliki hukum dan kekuasaan, selain juga memenuhi hak-hak warga negaranya. Dengan berpolitik PEB bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat akan tercapai apabila negara menegakkan hukum. Pembentukan negara hukum menurut PEB adalah tugas dari politik.

c. Ekonomi

Pemakaian kata ekonomi dalam PEB adalah sebagai pembeda organisasi politik ini dari organisasi lainnya. Ekonomi disini adalah ciri khusus PEB sebagai organisasi politik.

Menurut PEB, struktur ekonomi menentukan politik. Semakin sejahtera manusia dengan kehidupan ekonomi yang semakin baik, maka akan tercipta politik yang sehat, berdasarkan perekonomian manusia. Menurut PEB, hukum politik modern adalah politik ekonomi dan tujuan ekonomi adalah menumbuhkan kesejahteraan rohani manusia. Politik ekonomi modern telah menempatkan manusia sebagai manusia dan bukan mengutamakan kemakmuran, dan menyisihkan semuanya demi kesejahteraan murni.

B. Tujuan dan Program PEB

Dalam *orgaan* PEB dijelaskan mengenai tujuan PEB.

1. Menjamin pertumbuhan ekonomi secara cepat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara teratur bagi semua penduduk Hindia Belanda.
2. Menyatukan semua golongan penduduk untuk bisa bertanggung jawab untuk bisa mencapai pemerintahan sendiri berdasarkan demokrasi seluas-luasnya, dengan tetap mempertahankan ikatan dengan negara induk.⁹⁵

Sebagai sebuah partai politik PEB mempunyai program-program utama.

Terdapat 10 program utama dari PEB, yaitu⁹⁶:

1. Berusaha dengan keras memajukan pendidikan, memajukan ekonomi dan memajukan kesejahteraan orang banyak.
2. Mengusahakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat. Berusaha menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang yang selesai mendapatkan pendidikan.
3. Menghimbau orang suka menyimpan uang (menabung) dan melawan riba. Akan berusaha secara perlahan-lahan namun pasti memajukan ekonomi pribumi, menuntut mendapat undang-undang yang menyusun kemakmuran

⁹⁵ *Politieke Economische Bond de Nederlansch – Indische Associatie Partij* no.2 (1929) – no.4 (1929). Bandoeng : S. N. 1929, hal. 1

⁹⁶ *Politieke Economische Bond de Nederlansch – Indische Associatie Partij* no.2 (1929) – no.4 (1929). Bandoeng : S. N. 1929, hal. 1

bagi orang banyak dan membuat undang-undang perusahaan untuk menolong mereka yang tidak mampu.

4. Berusaha membuat peraturan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, dengan menjadikan kepolisian sebagai petugas yang akan menjalankan aturan tersebut dengan baik.
5. Berusaha memperoleh kepastian keadilan bagi seluruh bangsa penduduk negeri, berusaha memperoleh keputusan pengadilan dengan cepat dan dengan jalan yang murah.
6. Berusaha menyediakan tenaga pegawai negeri yang baik dalam melayani masyarakatnya, yang tenaganya dibayar sesuai dengan pendapatan negeri. Merencanakan peraturan pajak yang baik, dimana masyarakat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.
7. Menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, dan mencegah masyarakat dari penyakit.
8. Menanamkan adat hormat menghormati dan gotong royong bagi semua penduduk yang berdiam di Hindia Belanda, dengan tidak membedakan suku, bangsa, maupun agama.
9. Berusaha mewujudkan pemerintahan desentralisasi, yaitu pemerintahan yang tidak dijalankan secara terpusat, melainkan melalui kata mufakat.
10. Berusaha mengadakan bala tentara, yang dapat memelihara keamanan dan ketertiban di tanah Hindia, dan bala tentara itu diatur dan diberi alat dan

senjata, yang belanjanya berpadanan dengan hasil pendapatan negeri, sehingga ia nanti sanggup pula melawan musuh dari luar negeri.

Selain itu, PEB juga memiliki haluan “*Sum cuique tribuere*” yang artinya, seseorang memberikan apa-apa yang ada padanya. Bahwa setiap penduduk Hindia Belanda harus saling tolong menolong terhadap sesamanya dengan tidak membedakan golongan.

Untuk melaksanakan program-program PEB tersebut dilakukan dengan cara:

1. Menyebarkan wawasan organisasi melalui sarana organ sendiri, brosur dan pers lewat rapat, ceramah umum dan sebagainya.
2. Meyusun rencana yang akan dijalankan oleh program ini dengan bantuan dan kerjasama dari tenaga ahli.
3. Bekerjasama dengan organisasi dan partai-partai lain yang mendukung dan menyetujui program PEB.
4. Memberikan bantuan dalam pemilihan bagi lembaga perwakilan, baik di Hindia maupun di Belanda, dengan menempatkan calon dari organisasi ini maupun dari golongan lain yang dianggap pantas untuk duduk dalam lembaga perwakilan.⁹⁷

Untuk melaksanakan program-program PEB dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan PEB, maka dibentuk suatu *orgaan*. Terdapat dua macam *orgaan* PEB, yang pertama surat kabar *Kaoem Moeda* yang dikelola oleh masyarakat pribumi dan berkedudukan di Bandung. Surat kabar ini dipimpin oleh tokoh pribumi Tuan Mas

⁹⁷ *Orgaan PEB*, 1 November 1923, hal. 609

Partadireja dari Bandung. Surat kabar ini sempat menjadi sarana untuk mengoreksi kesalahan pemerintah. Sedangkan yang lain adalah majalah mingguan *Orgaan van PEB* yang dikelola oleh pengurus pusat dan berkedudukan di Batavia. Edisi pertamanya terbit pada 9 Juli 1920. Tujuan dibentuknya orgaan selain untuk menyebarkan kegiatan juga sebagai sarana pengikat di antara anggota, pengurus pusat dan pengurus cabang. Orgaan PEB harus mampu memberikan wawasan bagi anggotanya dalam persoalan kepentingan umum.⁹⁸

C. Reaksi Pemerintah dan Surat Kabar atas Pendirian PEB

Reaksi pemerintah atas pendirian PEB adalah mendukung pendirian partai tersebut. Dikatakan bahwa PEB adalah partai kaum reaksioner yang didirikan dengan tujuan memajukan Hindia Belanda.⁹⁹ Tujuan dan program PEB tidak bertentangan dengan pemerintah Hindia Belanda, dan untuk mewujudkan tujuannya, pemerintah mendukung program-program PEB.¹⁰⁰ Dalam surat kabar berbahasa Sunda *Padjadjaran*, diberitakan bahwa PEB adalah partai kaum pemilik modal yang didukung oleh pemerintah.¹⁰¹

Dalam harian *Sinar Hindia* diberitakan bahwa sebelum kaum kapitalis mendirikan PEB, propaganda komunis belum gencar dilakukan. Dengan berdirinya

⁹⁸ *Orgaan PEB*, Rabu, 18 Oktober 1922, hal. 231-232

⁹⁹ *De Taak*, 11 Oktober 1919

¹⁰⁰ *Orgaan PEB*, 9 Juni 1920, hal. 3

¹⁰¹ *Padjadjaran*, 25 Oktober 1920

PEB dianggap oleh kaum komunis sebagai partai yang menghalangi pergerakan komunis.¹⁰²

Dalam *Vrijzinnig Weekblad* diberitakan bahwa PEB merupakan partai kaum reaksioner. Dengan berdirinya PEB menyebabkan kaum komunis menjadi lebih gencar dalam menyebarkan pengaruhnya. Hal ini dilakukan kaum komunis untuk mencegah rakyat masuk dalam PEB.¹⁰³ Sedangkan dalam *Neratja* diberitakan bahwa PEB adalah partai yang tidak mendukung pergerakan nasional dikarenakan menghalangi kemajuan Hindia Belanda.¹⁰⁴

D. Keanggotaan dan Pengurus PEB

1. Keanggotaan PEB

Anggota dari organisasi ini terdiri atas semua warga Hindia Belanda dimana saja ia tinggal, tanpa membedakan keturunan, ras maupun agama, yang setuju dengan program dan tujuan organisasi. Keanggotaan dapat diperoleh melalui permintaan tertulis pada sekretaris cabang, tempat pemohon tinggal, pada sekretaris perwakilan di Belanda, kemudian apabila pemohon tinggal di luar daerah itu, pada sekretaris pengurus pusat. Para anggota wajib untuk membayar iuran di mana jumlahnya ditetapkan oleh setiap anggota, namun demikian jumlah ini tidak akan berada di bawah jumlah minimal yang ditetapkan pada Peraturan Rumahtangga. Keanggotaan akan batal apabila anggota mengundurkan diri, dan menunggak pembayaran iuran

¹⁰² *Sinar Hindia*, 20 Oktober 1920

¹⁰³ *Vrijzinnig Weekblad*, 30 Oktober 1920

¹⁰⁴ *Neratja*, 14 Februari 1921

serta apabila terbukti meyakinkan bahwa anggota terkait melalui kata-kata, tindakan atau tulisan merugikan organisasi, selain juga bertindak melawan prinsip organisasi.¹⁰⁵ Anggota PEB terdiri dari berbagai golongan, antara lain dari golongan pengusaha besar, tokoh-tokoh ekonomi, kaum eksekutif Belanda, dan para priyayi yang memiliki kepentingan didalamnya. Selain itu, PEB juga menjadikan para kiai dan guru sebagai anggotanya. Hal itu dilakukan karena kiai dan guru merupakan tokoh masyarakat yang efektif untuk mengajak masyarakat bergabung dalam PEB.

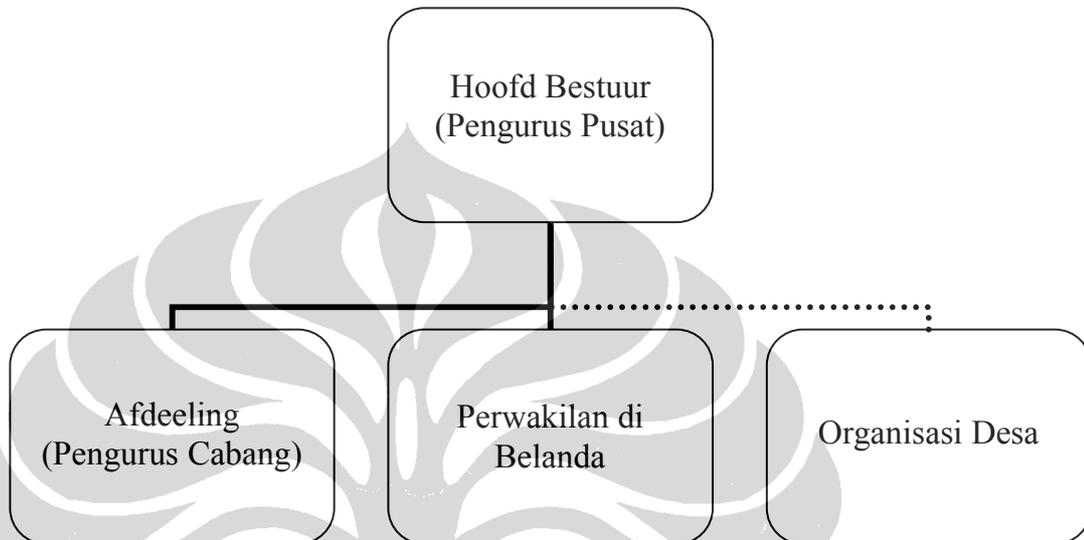
Berdasarkan susunan kepengurusan PEB, anggota PEB terutama adalah dari bangsa Eropa, dan sedikit dari golongan pribumi. Dari kepengurusan tahun 1920, hanya satu orang pribumi yang duduk dalam pengurus pusat PEB. Anggota pribumi yang duduk dalam pengurus pusat pada tahun 1927 bertambah menjadi tiga orang. Mereka adalah P. A. A. Koesoemo Joedo, P. A. Mandagie dan Tjokorde Gde Rake Soekawati.¹⁰⁶

Dari jumlah tersebut dapat dilihat keanggotaan PEB sebagian besar terdiri dari golongan Eropa. Dibandingkan golongan Eropa, golongan pribumi hanya sedikit yang menjadi anggota PEB. Terdapat juga golongan Timur asing (Cina) yang masuk menjadi anggota PEB. Dapat dikatakan bahwa PEB merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh golongan Eropa, dan dalam kepengurusannya lebih dominan orang Eropa daripada pribumi.

¹⁰⁵ *Orgaan PEB*, 1 November 1923, hal. 604

¹⁰⁶ *Orgaan PEB*, 30 Juni 1927, hal. 212

2. Pengurus Pusat PEB



Ket: : tidak terikat kepada PEB, namun mendapat bantuan dana dari PEB.

Sumber: *Orgaan PEB*, 1 November 1923, hal. 605

PEB selaku sebuah organisasi memiliki kepengurusan dan struktur organisasi. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi berada pada rapat umum. Rapat umum setidaknya diadakan setahun sekali. Organisasi ini dikelola oleh sebuah pengurus pusat yang maksimal terdiri atas sebelas anggota organisasi. Pengurus pusat berwenang untuk menunjuk para wakil bagi daerah di mana terdapat kebutuhan untuk memperhatikan kepentingan organisasi oleh pengurus pusat. Pengurus pusat bertugas menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga umum organisasi. Salah satu anggota pengurus pusat menjadi ketua dan salah satunya menjadi bendahara. Pengurus pusat dalam rapat umum dipilih dari mayoritas suara yang disampaikan.

Ketua dengan cara yang sama akan dipilih secara khusus. Pengurus pusat dipilih selama periode setahun tetapi segera bisa dipilih kembali. Pengurus harian dari organisasi ini dibentuk oleh ketua, bendahara dan seorang anggota yang ditunjuk oleh pengurus pusat. Pengurus harian mewakili organisasi untuk urusan dalam dan luar kepartaian.¹⁰⁷ Pengurus pusat dalam menjalankan tugasnya bertempat di Welterveden, Batavia.

Susunan pengurus pusat tahun 1919 terdiri dari:

- Ketua : A.J.N. Engelenberg
- Anggota/Sekretaris : L.J.A.F.M. Lips
- Anggota/Bendahara : J.H.L. de Koningh
- Anggota : J.M.H. van Dorssen
- Anggota : Raden Suria Karta Prawira
- Anggota : A.E. Reynst
- Anggota : Th. A. Ronkes Agerbeek
- Anggota : E.A.O. Vervooren
- Anggota : J.H. van Wely¹⁰⁸

Dikarenakan kepergian ke negeri Belanda dan karena alasan lain, berulang kali terjadi mutasi pada pengurus pusat.¹⁰⁹ Susunan pengurus pusat pun berubah dari tahun pertama berdirinya organisasi. Untuk kepengurusan tahun 1923 terjadi perubahan pengurus, yaitu:

¹⁰⁷ *Orgaan PEB*, 1 November 1923, hal. 606-607

¹⁰⁸ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922, hal. 230

¹⁰⁹ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922, hal. 230

- Ketua : A.J.N. Engelenberg
- Sekretaris : Mevrouw E. Kies van Senden
- Bendahara : C. H. M. H. Kies
- Anggota : Mr. Dr. H. Westra
- Anggota : L. F. Van Gent
- Anggota : J. C. Lamster
- Anggota : P. C. A. J. Quanjier¹¹⁰

Sedangkan pada tahun 1927 susunan kepengurusan berubah lagi.

Susunan pengurus pusat tahun 1927 adalah:

- Ketua : A.J.N. Engelenberg
- Wakil Ketua : Ch. M. H. Kies
- Sekretaris : J. Olivier
- Bendahara : Dr. P. J. van Loo
- Anggota : Mr. R. A. A. Fruin
- Anggota : P. A. A. Koesoemo Joedo
- Anggota : S. Kromsigt
- Anggota : B. Roep
- Anggota : Tjokorde Gde Rake Soekawati
- Anggota : Yo Heng Kam
- Anggota : P. A. Mandagie.¹¹¹

¹¹⁰ *Orgaan PEB*, 20 September 1923, hal. 168

¹¹¹ *Orgaan PEB*, 30 Juni 1927, hal. 212

Walaupun keanggotaan pengurus pusat sering berubah-ubah, namun jabatan ketua sampai tahun 1928 tetap dipegang oleh Engelenberg. PEB adalah sebuah partai politik yang bergantung pada pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari kemunduran PEB yang salah satu penyebabnya adalah pulangnya Engelenberg ke negeri Belanda pada tahun 1929.¹¹²

3. Pengurus Cabang PEB

Sedangkan untuk pengurus cabang, masing-masing setidaknya terdiri atas tiga anggota: yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, dengan pengertian bahwa dua fungsi terakhir ini bisa disatukan dalam satu orang, dalam kasus itu anggota ketiga bisa menduduki jabatan komisaris. Setiap cabang mengatur aktifitasnya sendiri dan membuat peraturan rumah tangganya. Setiap tahunnya pada bulan Januari, pengurus cabang harus mengirimkan suatu tinjauan tentang kondisi dan laporan aktivitas cabang kepada pengurus pusat, di samping laporan jumlah anggota dan jumlah iuran masuk.¹¹³

Sebagai partai yang didukung oleh pengusaha Belanda, PEB dapat dengan cepat berkembang dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari cabang-cabang yang telah didirikan PEB yang tersebar di berbagai daerah, terutama di Jawa. Cabang-cabang yang berikut anggotanya, antara lain: Bandung 312 anggota, Banyumas 127 anggota, Besuki 309 anggota, Blitar 48 anggota, Kediri Utara 44 anggota, Malang 388

¹¹² AK Pringgodigdo. *Op Cit*, hal. 15

¹¹³ *Orgaan PEB*, 1 November 1923, hal. 610-611

anggota, Palembang 108 anggota, Purwakarta 15 anggota, Probolinggo 112 anggota, Semarang 267 anggota, Surabaya Utara 114 anggota, Pantai Timur Sumatera 11 anggota, Tegal 191 anggota, dan *Vorstenlanden* (wilayah kerajaan mencakup Solo dan Surakarta) dengan 231 anggota.¹¹⁴

Cabang –cabang yang dimiliki PEB berkembang dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 1927, cabang-cabang PEB sudah terdapat di luar Jawa. Diantaranya di Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Ambon. Cabang-cabang yang dimiliki PEB sampai tahun 1927 beserta pemimpinnya antara lain:¹¹⁵

Tabel Cabang dan Pengurus Cabang PEB 1927

Afdeeling	Pengurus
Batavia	B. Roep: Voorzitter, J. W. Kuiper: Secretaris
Sukabumi	J. W. van Teyn, Voorzitter, A. Meeuse: Secretaris, Cremer: Penningmeester
Bandung	Ir. W. C. J. de Graaff: Voorzitter, Chr. van Hoogerhuijs: Secretaris-Peningmeester
Cirebon	J. C. Driessen: Voorzitter, Jhr. Mr. K. L. O. van der Goes: Secretaris-Peningmeester
Tegal	L. K. Ph. Munch: Voorzitter, W. E. M. Heuperman: Secretaris-Peningmeester
Pekalongan	P. J. G. Weyne: Voorzitter, Th. Niggebrugge: Secretaris, A. M. Timmermans: Penningmeester
Purwokerto	J. Poll: Voorzitter, Mr. J. A. Coutinho: Secretaris, Ir. J.

¹¹⁴ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922, hal. 232-234

¹¹⁵ *Orgaan PEB*, 30 Juni 1927, hal.212-214

	A. Zwager: Penningmeester
Semarang	Mr. G. N. Bouma: Voorzitter, Mr. J. G. A. ten Siethoff: Secretaris-Penningmeester
Kedu	A. H. G. Velt: Voorzitter
Klaten	Mr. K. Denijs: Voorzitter, J. E. Scheffer: Secretaris-Penningmeester
Solo	L. J. Brinks: Voorzitter, W. A. Coester: Secretaris-Penningmeester
Blitar	J. A. E. van Deventer: Voorzitter, W. Boyd: Secretaris-Penningmeester
Malang	Ph. L. van Dam: Secretaris-Penningmeester
Pasuruan	J. van Harreveld: Secretaris-Penningmeester
Kediri	H. Loriaux: Voorzitter, P. Vierhout: Secretaris-Penningmeester
Besuki	H. H. J. Gasille: Voorzitter, P. M. Cohen: Secretaris-Penningmeester
Sumatra Oostkust	Mr. P. B. Dijksterhuis: Voorzitter, D. Wolfson: Secretaris-Penningmeester
Padang	A. A. van der Pijl: Secretaris-Penningmeester
Fort de Kock	Mr. M. Bachrah: Voorzitter
Payakumbuh	Datoek Sinaro Kajo: Voorzitter, Datoek Padoeko Alam: Secretaris, Datoek Toenaro: Penningmeester
Lubuk-Sikaping	Abdoel Aziz Soetan Kenaikan: Voorzitter, A. Latip: Secretaris
Palembang	Mr. N. Koers: Voorzitter
Borneo	S. A. de Flines: Voorzitter, H. K. M. Defares: Secretaris, J. Tan: Penningmeester
Makassar	Mr. J. van Hoeve: Voorzitter

Minahasa	A A. Maramis: Voorzitter, H. Loing Jz.: Secretaris-Penningmeester
Ambon	J. Broensen: Secretaris-Penningmeester
Zuid Bali	Agoeng Dewa Ngoera: Voorzitter, Tjokorda Rai Poedak: Secretaris
Bali dan Lombok	Tjokorde Gde Rae Soekawati
Perwakilan di Belanda	C. H. Van Rietschoten: Voorzitter, J. E. Bylo: Secretaris-Penningmeester

Berdasarkan daftar pengurus cabang tersebut, pada umumnya yang menjabat sebagai ketua maupun sekretaris dan bendahara umumnya merupakan orang Eropa. Hanya di daerah Lubuk Sikaping dan Bali yang pengurusnya merupakan orang pribumi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun PEB merupakan partai politik campuran, namun kepengurusannya hampir berada ditangan orang-orang Eropa. Hanya sedikit penduduk pribumi yang duduk dalam kepengurusan cabang.

Selain itu PEB juga membentuk perkumpulan-perkumpulan berdasarkan daerah. Seperti di Jawa Barat, terdapat perkumpulan Djamiatoel Hasanah, dan Soekalilah yang hanya mencakup wilayah Tasikmalaya. Di Jawa Timur juga ada perkumpulan PEB Bumiputera (Pikoekoeling Emon Bondo) yang didirikan oleh *regent* Blora. Ada juga Perkoempoelan Adat Alam Minangkabau dan Afdeeling Bumiputera di Bali. Perkumpulan tersebut umumnya dibentuk oleh golongan pribumi

yang diwakili oleh para kaum priyayi dan pemuka agama yang pro PEB. Tujuannya sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan rakyat terhadap PEB.¹¹⁶

Dengan banyaknya keanggotaan PEB dan cabang-cabang yang tersebar di berbagai daerah, telah menjadikan PEB sebagai salah satu partai politik campuran yang besar dan kuat. Mereka mampu menempatkan anggota-anggotanya sebagai yang terbanyak duduk di *volksraad* dan mampu menguasai dewan rakyat tersebut selama kurun waktu 1921-1931.¹¹⁷ Dengan demikian banyak kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berasal dari aspirasi para anggota PEB. Maka tidaklah mengherankan apabila para tokoh pergerakan seperti Abdul Muis dan Tjokro Aminoto merasa kecewa dengan *Volksraad* dan akhirnya keluar dari Dewan Rakyat tersebut. Hal tersebut juga diikuti oleh Agus Salim yang bergabung di *Volksraad* pada masa 1921-1924. Menurut mereka perjuangan dari *Volksraad* tak akan membawa hasil, karena didalamnya terdapat golongan-golongan konservatif yang tidak menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda.

4. Perwakilan PEB di Belanda

Sebagai partai politik yang didirikan oleh orang Belanda di Hindia Belanda, PEB memiliki perwakilan di Belanda. Organisasi di Belanda diwakili oleh sebuah komite yang disebut perwakilan di Belanda dari *Politiek Economische Bond* Hindia Belanda. Perwakilan di Belanda terdiri setidaknya atas lima orang, perwakilan

¹¹⁶ *Orgaan PEB*, 15 Juli 1927, hal. 237

¹¹⁷ Schumutzer, E.J.M. *Dutch Colonial Policy and the Search for Identity 1920-1931*. Leiden, 1977. hal. 163-165

menunjuk dari kalangan mereka sendiri seorang ketua, sekretaris dan bendahara, dengan pengertian bahwa dua jabatan pertama bisa disatukan pada satu orang. Perwakilan di Belanda akan memperhatikan kepentingan Hindia Belanda dari Belanda menurut prinsip organisasi. Mereka setiap tahun pada bulan Januari mengirimkan kepada pengurus pusat suatu tinjauan tentang apa yang sepanjang tahun terjadi di wilayahnya (Belanda) dan sebuah laporan tentang apa yang dikerjakan olehnya.¹¹⁸

Perwakilan di Belanda ini terdiri dari:

- Mr. J. Gerritzen, mantan direktur Javasche Bank, sebagai ketua
- A.F.L. Faubel, mantan Kolonel kepala pengawal *Nederlandsche Indische Leger* (NIL)
- C.J. Faith, mantan residen
- G.L. Gongrijp, Sr., mantan residen
- Prof. Dr. J.C. Kielstra, guru besar sekolah tinggi perkawinan
- Prof. D.G. Stibbe, guru besar luar biasa di sekolah tinggi dagang
- H.A. Voet, asisten residen
- A.T.H. Winter, mayor staf umum NIL
- J.E. Bylo, mantan inspektur keuangan, sekretaris.¹¹⁹

¹¹⁸ *Orgaan PEB*, 1 November 1923, hal. 612-613

¹¹⁹ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922, hal. 233

BAB IV

AKTIVITAS PEB 1919-1931

A. Keanggotaan PEB dalam Volksraad

Dengan banyaknya cabang yang dimiliki PEB di berbagai daerah, maka tidaklah mengherankan apabila partai ini berhasil mendudukkan anggota-anggotanya dalam *Volksraad*. PEB bahkan selama kurun waktu 1921-1931 menempatkan anggota-anggotanya sebagai yang terbanyak duduk dalam *Volksraad* mengalahkan partai lainnya.¹²⁰

Selama periode 1921-1924 PEB berhasil mendudukkan tujuh orang wakil dari golongan Eropa, delapan orang dari golongan pribumi, dan satu orang dari golongan timur asing. Pada periode berikutnya 1924-1927 wakil PEB di *Volksraad* terdiri dari lima orang golongan Eropa dan sepuluh orang dari golongan pribumi. Periode 1927-1931 menjadi dominasi terakhir PEB dalam *Volksraad*. PEB berhasil menempatkan enam orang wakil dari golongan Eropa, enam orang dari golongan pribumi dan satu orang dari golongan timur asing.¹²¹ Sedangkan sejak tahun 1931-1942 kedudukan PEB dalam *Volksraad* melemah. Dari lima belas anggota golongan Eropa, PEB hanya mendapatkan satu perwakilan. Dari golongan pribumi juga demikian, dari dua puluh

¹²⁰Van der Wall. *De Opkomst van de Nationalistische beweging in Nedelands-Indie*. Groningen: J.B. Wolters, 1967. hal. 690-693.

¹²¹*Ibid.* hal. 690-691

anggota, PEB hanya mempunyai dua wakil, dan sisanya satu wakil dari golongan timur asing. Pada kurun 1935-1939 dan 1939-1942, PEB bahkan tidak mendudukkan satu wakilpun dari golongan Eropa. Dari golongan pribumi hanya mendudukkan dua wakil pada tahun 1935-1939 saja. Hanya satu wakil dari golongan timur asing yang mewakili PEB selama dua periode tersebut.¹²²

Dengan dominasi PEB di *volksraad* antara 1921-1931 telah menciptakan PEB sebagai partai politik yang memegang kekuasaan. *Volksraad* digunakan PEB sebagai sarana untuk mewujudkan kegiatannya. Wakil-wakil PEB yang duduk di *Volksraad* menyurakan aspirasi mereka berdasarkan tujuan partai. Para wakil PEB yang duduk dalam *Volksraad* pada 1921-1924 antara lain adalah: A.J.N. Engelenberg, Mr. H. s'Jacob, M.B. van der Jagt, G. J. Houtsma, B. Roep, Mr. A. Van Gennep, C.H.M.H. Kies, Mr. Dr. H. Westra, Tuan Mr. H. A. Galestin tampil sebagai wakil IEV. Sedangkan dari golongan pribumi antara lain adalah: P.T.A. Koesoemo Joedo, Raden Kamil, Mas Boediharjo, R.M.A.P. Ariodinoto, R.T. Moh. Notodisoerjo, Gelar Datuk Madjo Lelo Darwis, R.T. Said, Raden Soerohadiwidjoyo, Raden Sadjirun, dan P.A. Mandagi.¹²³

Dari dua belas anggota *Volksraad* dari golongan Eropa dan timur asing, sepuluh orang adalah wakil PEB, sedangkan dari dua belas anggota pribumi, sembilan orang wakil PEB. Maka tidak heran apabila oleh kaum pergerakan *Volksraad* periode tahun 1921-1924 disebut *dewan doeit*. Karena di dalamnya terdapat

¹²² *Ibid.* hal. 690-691

¹²³ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922

sebagian besar perwakilan PEB, yang dituduh menggunakan uang dalam mencari dukungannya. Isi dari artikel tersebut adalah:¹²⁴

“Dari 12 anggota bangsa Belanda dan bangsa Asing djoemlah ada 10 orang dari PEB, sedang dari 12 anggota bangsa Boemipoetra djoemlah ada 9 orang dari PEB mendjadi djoemlah besar dari 24 anggota Dewan Ra’iat ada 19 orang dari PEB. Oleh karena itoe pada siapa jang soeka berkata sebetoeInja, akan meroebah nama Dewan Ra’iat ini menjadi Dewan Doeit.”

Seorang tokoh nasionalis Abdul Rivai bahkan mengkritik PEB sebagai *Politioneele Minta Wang Bond*, karena menurutnya PEB merupakan lobi politik para konglomerat pengusaha gula.¹²⁵

Kandidat perwakilan PEB untuk periode *Volksraad* tahun 1924-1927 adalah:

A.J.N. Engelenberg (*volksraadslid*), Mr. H. s’Jacob (*volksraadslid*), F. H. De Hoog, (*Hoofdambtenaar S. S*), F. H. K. Zaalberg, Perwakilan IEV (*Hoofdredacteur Bataviaasch Nieuwsblad*), B. Roep (*volksraadslid*), E. J. L. Fuhri, (*ingenieur*), C.H.M.H. Kies (*volksraadslid*), J. Van der Weiden, Perwakilan IEV (*Kolonel de Infanterie*), Dr. R. A. A. Fruin, (*Secretaris Deli-Plantersvereeniging*), H. E. K. Ezeman, (Assistent resident Pemantang Siantar), C. Deggeller, (*Arts*), dan J. E. Van Gogh, (*Onderhoofd Zoutregie*). Sedangkan kandidat dari golongan pribumi antara lain adalah: P.T.A. Koesoemo Joedo (regent Ponorogo), R.M.A.P. Ariodinoto (regent Cirebon), R.T. Sosrohadiwidjojo (regent Demak), P. A. Mandagie (Menado), R. T. A. Sosrodiprodjo (regent Wonosobo), Datuk Rangkayo Maharadja Loetan (Demang de Batanghari districten), R. M. Soedarto Mangkoe Soebroto, Raka Tjokorda (Poenggawa Oboed), Teungko Moesa (Districhoofd Tandjong Balei), R. Mardjono

¹²⁴ *Neratja*, 14 Februari 1921.

¹²⁵ Hans van Miert. *Op Cit*, hal. 281

(Kapitein Infanterie), R. M. A. Soerjo Atmodjo (abdi Paku Alam), dan R. T. Tjokro Soetomo (regent Toemenggung).¹²⁶ Dari kandidat tersebut, lima orang golongan Eropa dari PEB duduk dalam *Volksraad*, dan 10 orang dari golongan pribumi duduk dalam *Volksraad*.

Mereka yang duduk dalam *Volksraad* pada periode 1924-1927 adalah:

Golongan Eropa antara lain: A.J.N. Engelenberg, Mr. H. s'Jacob, F. H. De Hoog, B. Roep, dan C.H.M.H. Kies. Sedangkan dari golongan pribumi yaitu: P.T.A. Koesoemo Joedo, R.M.A.P. Ariodinoto, R.T. Sosrohadiwidjojo, P. A. Mandagie, R. T. A. Sosrodiprodjo, Datuk Rangkayo Maharadja Loetan, Raka Tjokorda, R. Mardjono, Teungko Moesa, dan R. T. Tjokro Soetomo.

Sedangkan untuk kandidat PEB dalam *Volksraad* periode 1927-1931 adalah:

A.J.N. Engelenberg (*volksraadslid*), Mr. H. s'Jacob (*volksraadslid*), F. H. De Hoog, Perwakilan IEV, F. H. K. Zaalberg, Perwakilan dari IEV, B. Roep (*volksraadslid*), G. J. Zuyderhoff, , C.H.M.H. Kies (*volksraadslid*), J. Van der Weiden, Perwakilan IEV, Dr. R. A. A. Fruin, , Mr. P. A. Blaauw perwakilan IEV, F. H. Zeydel, perwakilan IEV, dan L. A. Snell, perwakilan IEV. Sedangkan kandidat dari pribumi antara lain adalah: P.T.A. Koesoemo Joedo (regent van Ponorogo), R.T. Sosrohadiwidjojo (regent van Demak), P. A. Mandagie (sulawesi), R. T. A. Sosrodiprodjo (regent van Wonosobo), Datuk Rangkayo Maharaja Loetan (west sumatera), Tjokorda Gde Raka Soekawati (Bali), Ali Moesa (Noord Sumatera), H. D. J. Apituley (Ambon), dan R. M. Adipati Koesoemo Oetojo (Yogyakarta). Selain itu juga terdapat dua kandidat

¹²⁶ *Orgaan PEB*, 15 Nov 1923

golongan timur asing. Mereka adalah H. H. Kan (timur asing) dan Yo Heng Kam (timur asing).¹²⁷

Kandidat PEB yang berhasil duduk dalam *Volksraad* dari golongan Eropa enam orang. Dari golongan pribumi terdapat enam orang, dan golongan timur asing satu orang. Dari golongan Eropa yaitu: A.J.N. Engelenberg, Mr. H. s'Jacob, B. Roep, C.H.M.H. Kies, F. H. De Hoog, dan Dr. R. A. A. Fruin. Dari golongan pribumi yaitu: P.T.A. Koesoemo Joedo, R.T. Sosrohadiwidjojo, P. A. Mandagie, R. T. A. Sosrodiprodjo, Datuk Rangkayo Maharaja Loetan, dan Tjokorda Gde Raka Soekawati. Dari golongan Timur Asing yang duduk dalam *Volksraad* adalah Yo Heng Kam.

Dengan mayoritas anggota PEB duduk dalam *Volksraad* antara 1921-1931 menjadikan partai ini sebagai kekuatan kaum konservatif. Dalam keanggotaannya di *Volksraad* partai ini mendapat banyak perlawanan, terutama dari golongan kaum pergerakan nasional. Salah satunya telah disebutkan diatas.

B. Perjuangan PEB dalam Bidang Pemerintahan dan Pendidikan

Hindia Belanda pada awal abad ke-20 telah mengalami perkembangan yang pesat. kondisi sosial ekonomi semakin meningkat, disertai dengan bermunculannya sekolah-sekolah untuk memajukan pendidikan. Dalam bidang pemerintahan kebebasan dibuka, dan terjadi desentralisasi kekuasaan ke daerah. Dengan berdasarkan situasi pada awal abad ke-20, PEB membuat propaganda terhadap

¹²⁷ *Orgaan PEB*, 31 Jan 1927

masyarakat. Propaganda tersebut antara lain dalam bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Walaupun banyak terjadi pertentangan dengan kaum pergerakan, propaganda yang dilakukan PEB dapat membuatnya menjadi partai besar pada awal abad ke-20. Pada umumnya propaganda yang dilakukan oleh PEB berhasil mendapat dukungan dari pemerintah kolonial dan dapat diterima oleh masyarakat Hindia Belanda.

1. Perjuangan dalam Bidang Pemerintahan

Berdasarkan tujuan PEB yang tercantum dalam anggaran dasarnya yaitu: mencapai pemerintahan sendiri berdasarkan demokrasi yang seluas-luasnya. Untuk mencapai demokrasi yang luas, diperlukan pemerintahan desentralisasi. Sesuai dengan programnya, PEB berusaha mewujudkan pemerintahan desentralisasi, yaitu pemerintahan yang tidak terpusat, melainkan yang dicapai melalui kata mufakat melalui perwakilan-perwakilan daerah. Dalam hal ini kekuasaan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah (dewan kotapraja) untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan daerahnya berdasarkan kondisi yang terjadi didaerahnya.

PEB menganggap bahwa pembuat kebijakan ditingkat pusat dalam membuat aturan daerah hanya mengetahui kondisi umum daerah tertentu. Pemerintah pusat tidak mengetahui secara cermat kondisi sosial masyarakat daerah. Setiap daerah memiliki perbedaan masing-masing. Untuk itulah, perlu adanya pemerintahan

desentralisasi, yaitu pemerintahan yang dipilih sendiri melalui sarana perwakilan warga untuk mengatur daerahnya dan memperjuangkan kepentingan daerahnya.

Dalam *orgaan* PEB diberitakan bahwa:¹²⁸

“Setiap orang yang berpikir tentang prinsip ini pasti berkesimpulan bahwa sistem ini (desentralisasi) bukannya mustahil tetapi suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan perkembangan yang sehat dari sub-bagian negara dan memperhatikan kepentingan mereka secermat mungkin, yang berbeda-beda bagi sejumlah besar kondisi lokal. Selain itu desentralisasi memiliki keuntungan besar bahwa warga akan terlibat pada persoalan umum. Mereka bisa menggunakan pengaruh lewat hak pilihnya pada dewan kotapraja dan karenanya secara tidak langsung juga pada persoalan di kotaprajanya. Tidak pernah terpikirkan bahwa warga akan diperbodoh secara politik jika semua selalu diatur oleh pemerintah pusat dan selama ini mereka tidak memiliki pengaruh.”

Sistem desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan perkembangan yang sehat dalam memajukan daerah berdasarkan kepentingan daerahnya. Selain itu desentralisasi memiliki keuntungan besar bahwa setiap warga akan terlibat pada persoalan umum daerahnya. Mereka bisa menggunakan pengaruh melalui hak pilihnya pada dewan kotapraja.¹²⁹

Dewan kotapraja adalah lembaga yang disertai wewenang untuk memerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat daerah. Dewan kotapraja terdiri atas orang-orang yang ditunjuk lewat sarana pemilihan umum.¹³⁰ Orang-orang yang dipilih mewakili kepentingan masyarakat daerah. Selanjutnya mereka bertugas untuk membuat aturan-aturan berdasarkan daerahnya dan membangun daerahnya bersama masyarakatnya.¹³¹

¹²⁸ *Orgaan PEB*, 1 Maret 1927, hal. 61-62

¹²⁹ *Orgaan PEB*, 1 Maret 1927, hal. 61-62

¹³⁰ *Orgaan PEB*, 8 Januari 1925, hal. 333-349

¹³¹ *Orgaan PEB*, 1 Maret 1927, hal. 61-62

2. Perjuangan PEB dalam Bidang Pendidikan

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, Hindia Belanda pada awal abad ke-20 telah mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan. Salah satu program PEB adalah meningkatkan pendidikan bagi masyarakat dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat.

Berdasarkan *orgaan* PEB dijelaskan pandangan PEB mengenai pendidikan, yaitu:

1. Penyediaan pendidikan yang sesuai bagi setiap anggota warga masyarakat merupakan kepentingan yang harus diutamakan.
2. PEB dalam program pendidikannya berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak Eropa maupun pribumi. PEB mengakui adanya dualisme dalam masyarakat di Hindia Belanda. Dualisme disini adalah kebudayaan Barat (Eropa) dan kebudayaan Timur (pribumi) dapat berjalan sejajar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PEB akan menyediakan sistem pendidikan yang mencakup dua bidang kebudayaan tersebut. Dengan tersedianya sistem pendidikan yang bersifat dualisme, diharapkan Hindia Belanda akan menjadi bersatu. Selain itu, dengan dualisme, kebudayaan Barat dapat lebih menyatu dan diterima oleh kebudayaan Timur.
3. Menurut PEB, pada masa itu Hindia Belanda kekurangan tenaga pengajar. PEB memandang untuk segera disediakan tenaga pengajar demi kepentingan pendidikan di Hindia Belanda. Dengan tersedianya tenaga pengajar yang cukup, akan memajukan lembaga pendidikan.

4. Untuk menyediakan tenaga pengajar tersebut dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan propaganda gencar bagi penyediaan tenaga guru yang cepat dan pencarian tenaga guru bagi setiap bidang pendidikan.
 - b. Lembaga pemerintah yang berkaitan dalam bidang pendidikan, diharapkan merangkul para orangtua pribumi untuk menjadi tenaga pengajar bagi para anak-anak. Untuk itu, PEB mengusulkan dibentuknya sebuah yayasan sekolah negeri. Tujuannya untuk mendidik para orangtua untuk menjadi tenaga pengajar yang sesuai dan berkualitas bagi generasi muda. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah diharapkan memberikan dukungan dan bantuan bagi yayasan ini.
5. Sistem pendidikan di Hindia Belanda menurut PEB memiliki kelemahan. Terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah-sekolah di Hindia Belanda hanya memberikan pelajaran dalam bidang teoritis dan kurang memperhatikan pelajaran praktis. Dengan demikian akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem pendidikan, yaitu pendidikan teoritis akan lebih menonjol dibanding pendidikan praktis. Sehingga masyarakat kurang mendapatkan manfaat langsung dari sistem pendidikan yang demikian.
6. Oleh karena itu PEB berusaha keras untuk mendirikan sekolah-sekolah yang lebih mengajarkan kemampuan praktis untuk kepentingan masyarakat. Sekolah-sekolah tersebut terutama akan memberikan pendidikan dalam bidang: pendidikan pertanian sederhana, pendidikan perkebunan sederhana, pendidikan pertukangan sederhana,

pendidikan kerajinan sederhana, pendidikan industri sederhana, dan pendidikan praktis lainnya. Pada sekolah-sekolah tersebut, pendidikan teoritis tetap diajarkan, namun lebih mengutamakan pendidikan praktis. Di samping itu, PEB juga berusaha untuk memberikan pendidikan lanjutan setelah pendidikan dasar. Pendidikan lanjutan diberikan kepada generasi muda usia 13-18 tahun, mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan yang diberikan adalah matematika, ilmu alam, dan sastra. Kemudian PEB akan mendirikan pendidikan kejuruan tinggi, pendidikan teknik, dan pendidikan tinggi umum. Tujuan dari didirikannya sekolah-sekolah tersebut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat menciptakan pegawai-pegawai pemerintahan yang bertanggung jawab.

7. Pemerintah Hindia Belanda mengalihkan wewenang mengenai pendidikan kepada pemerintah daerah dan lembaga pemerintah. Dalam hal ini wewenang pendidikan diatur oleh dewan masyarakat, dewan desa, dewan kabupaten, dan dewan propinsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pelimpahan wewenang langsung ke daerah, PEB memandang perlunya inisiatif swasta dalam mengembangkan pendidikan. Pihak swasta dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mendirikan sekolah-sekolah keterampilan dan kejuruan.
8. Menurut PEB, sistem pendidikan harus bersifat netral. Netral disini berarti bebas dari pengaruh agama dan politik. Sehingga pendidikan dapat diberikan kepada semua masyarakat di Hindia Belanda.

9. PEB berusaha dengan keras memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi para pemuda yang berbakat tanpa melihat kondisi sosial orang tuanya. PEB berusaha untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dengan orang tua tidak mampu. PEB akan membantu siswa yang berbakat tetapi tidak mampu, dengan memberikan beasiswa kepada mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai. Bagi para siswa yang mampu, dikenakan biaya pembayaran uang sekolah yang mahal. Uang tersebut digunakan untuk meningkatkan sarana pendidikan.
10. PEB menjadi pelopor wajib belajar bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Hindia Belanda.
11. PEB memandang pemerintah dan swasta harus saling membantu dalam masalah pendidikan. Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta harus memiliki persamaan dan saling melengkapi.¹³²

Dalam *orgaan* PEB dituliskan:¹³³

“...Selain itu di sini kita akan menyatakan bahwa aksi pendidikan tidak pernah bisa diwarnai oleh politik. PEB juga menghendaki agar kepemimpinan sekolah diserahkan kepada sebuah yayasan yang netral, yang harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat. Apa yang akan dicapai oleh PEB di bidang ini terutama adalah agar pendidikan keahlian praktis diberikan selain pendidikan moral. Dengan sistem pendidikan sekarang ini, kita tidak bisa mencapai hasilnya secara umum seperti yang diinginkan.”

Program PEB dalam bidang pendidikan mendapat dukungan dari pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya sekolah-sekolah di beberapa daerah seperti Padang dan Makassar. Selain itu PEB juga memberikan bantuan beasiswa

¹³² *Orgaan PEB*, 9 Juni 1920, hal. 9-10

¹³³ *Orgaan PEB*, 4 Agustus 1920, hal. 124

kepada masyarakat yang tidak mampu.¹³⁴ PEB bersama IEV juga mendirikan *Algemeene Kweekschool* (sekolah pendidikan guru umum).¹³⁵ Pelaksanaan propaganda dalam bidang pendidikan juga dilakukan PEB dengan diangkatnya pemimpin PEB Engelenberg, menjadi ketua sekolah pemerintahan (*Bestuur School*).¹³⁶ Engelenberg juga menjadi salah satu tokoh yang berhasil dalam menyebarkan kebudayaan Eropa kepada masyarakat pribumi melalui pendidikan.¹³⁷

C. Perjuangan PEB dalam Bidang Keamanan dan Kesehatan

1. Perjuangan PEB dalam Bidang Keamanan

Situasi keamanan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 relatif tidak stabil. Untuk itu diperlukan aturan yang menyangkut perbaikan kondisi keamanan atas orang dan barang. Keluhan tentang meningkatnya kerawanan di Hindia Belanda sangat banyak. Sebagai sarana untuk memerangi adalah memperkuat aparat polisi bersenjata, polisi lapangan, dan kepolisian umum. Pasti, korps ini dan pasukan militer akan sangat membantu menindas pembangkangan dan dengan melepaskan diri dari ikatan sosial lama, bila kriminalitas meningkat dan kekuasaan menurun, diperlukan suatu tindakan tegas di sana. Tetapi inti persoalan belum tersentuh. Kondisi rawan di

¹³⁴ *Orgaan PEB*, 7 Agustus 1924, hal. 244-256

¹³⁵ *Oetoesan Hindia*, 15 Januari 1923

¹³⁶ *Overzicht van de Inlandsche en Malaisch-Chineesche Pers*, (IPO) deel IV. Jakarta. 1922. hal.575.

Keterangan lengkap mengenai pemimpin PEB, Engelenberg, yang menjabat sebagai *Directeur van de Bestuurschool* dapat dilihat di surat kabar *Boedi Oetomo*, 5-14 Des 1922. Selain itu juga terdapat dalam *Darmo Kondo*, 6-16 Des. 1922. Lihat juga *Oetoesan Hindia*, 6 Des 1922.

¹³⁷ Robert van Niel. *Op. Cit.*, hal. 72

desa-desa perlu diganti dengan hubungan sehat yang didukung oleh sistem pemerintahan dalam masyarakat pribumi.¹³⁸

Pada tahun 1912 dibentuk polisi bersenjata (*gewapende politie*), yang bertugas untuk memadamkan huru-hara atau pemberontakan.¹³⁹ Dianggap tidak mampu memperbaiki keamanan di daerah pedesaan, dibentuk polisi lapangan menggantikan tugas polisi bersenjata. Tugasnya sebagai pelindung rakyat dan sekaligus sebagai kekuatan anti militer yang dapat digerakkan apabila terjadi huru-hara besar.¹⁴⁰ Dengan adanya polisi lapangan, terjadi perbenturan tugas dengan polisi bersenjata. Biaya yang dikeluarkan untuk dinas kepolisian pun menjadi besar.

PEB memandang bahwa kepolisian bersenjata seharusnya digabungkan dengan militer. Tujuannya untuk penghematan dan efisiensi kerja. Pada dasarnya tugas kepolisian bersenjata dengan militer adalah sama, sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban dan kekuasaan. Sedangkan untuk menjaga keamanan di daerah telah ada polisi lapangan. Atas dasar itulah PEB mengusulkan agar polisi bersenjata dan militer digabung dalam satu kesatuan. Dalam orgaan PEB djelaskan bahwa:¹⁴¹

“Tahun lalu saya menyampaikan pandangan secara singkat pandangan PEB sehubungan dengan pergantian di mana mungkin aparat kepolisian bersenjata dengan militer. Kita bertumpu pada pandangan penghematan dan penyederhanaan. ... Kami bertolak dari dugaan bahwa bila dua kekuatan saling berdampingan, sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban dan kekuasaan, ada alasan untuk menyelidiki apakah tidak bisa diterapkan penghematan. Dua kekuatan ini adalah tentara dan

¹³⁸ *Orgaan PEB*, 9 Agustus 1923, hal. 453-455

¹³⁹ Heather Sutherland. *Op. Cit.* hal.166-168

¹⁴⁰ *Ibid.* hal. 166-168

¹⁴¹ *Orgaan PEB*, 9 Agustus 1923, hal. 453-455

kepolisian bersenjata. Pada saat itu kami memperhitungkan bahwa salah satu dari keduanya, militer, tidak bisa diabaikan.”

Untuk penggabungan tersebut harus dipertimbangkan secara cermat kondisi wilayah setiap daerah. Dari penggabungan tersebut mereka harus tunduk kepada pemerintah, bukan kepada daerah tugasnya. Tugas kepolisian bersenjata yang sudah bergabung dengan militer, diserahkan kepada penduduk pribumi. Demikian pendapat PEB mengenai penggabungan polisi bersenjata dengan militer.¹⁴²

2. Perjuangan PEB dalam Bidang kesehatan

Kondisi kesehatan di Hindia Belanda pada awal abad XX umumnya buruk. Banyak penyakit yang menyerang penduduk, diantaranya adalah cacar, tipus, siphilis, kolera, malaria, radang paru-paru dan yang paling menghebohkan saat itu, pes. Buruknya kebersihan lingkungan tempat tinggal masyarakat pulau Jawa, usaha-usaha pelayanan kesehatan yang sedikit sekali dilakukan oleh pemerintah kolonial, dan adanya bahaya akan terjadinya wabah kelaparan ternyata menjadi faktor penentu dari muncul dan berkembangnya penyakit di Jawa.

Untuk mengatasi masalah kesehatan di Hindia Belanda, PEB melalui wakilnya di *Volksraad* memberikan pendapatnya. Berikut adalah pandangan PEB mengenai usaha untuk meningkatkan kesehatan yang disampaikan oleh pemimpinnya, Tuan Kies (sekretaris PEB), dan Raden Said (bupati Blora) dalam *Volksraad*.

¹⁴² *Orgaan PEB*, 9 Agustus 1923, hal. 453-455

PEB memandang bahwa kesehatan merupakan hal yang utama. Semua usaha untuk meningkatkan kesejahteraan akan sia-sia apabila tidak terdapat jiwa yang sehat.¹⁴³ Untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, PEB mengusulkan untuk membentuk Dinas Kesehatan Rakyat yang anggotanya terdiri dari masyarakat pribumi supaya bisa mencapai hasil yang maksimal.

Dinas Kesehatan Rakyat ini bertugas untuk membersihkan desa. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperluas dan merapikan saluran air. Kemudian membersihkan jalan dan pekarangan rumah agar sinar matahari dapat masuk kedalam rumah. Terbukti bahwa matahari merupakan pencegahan penyakit yang paling baik. Setelah itu, akan dibuat jalan-jalan yang lebar, saluran pembuangan yang baik, penanggulangan, pembabatan tanaman yang berlebihan, dan bahkan kalau perlu memindahkan lokasi rumah. Dinas Kesehatan Rakyat ini dipimpin oleh seorang aparat pemerintah dan dibantu seorang ahli kesehatan dengan beranggotakan penduduk sekitar. Apabila desa bersih, maka kemungkinan penyakit yang dapat berjangkit kecil.¹⁴⁴

Pandangan PEB lainnya adalah mengenai Dinas Kesehatan Umum. Menurut PEB, Dinas Kesehatan Umum tidak bisa mencakup seluruh perbaikan dalam kesehatan rakyat. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterlibatan rakyat dalam mencegah dan membasmi penyakit. Umumnya rakyat, terutama pedesaan, apabila

¹⁴³ *Orgaan PEB*, 3 Agustus 1921, hal. 97-106

¹⁴⁴ *Orgaan PEB*, 3 Agustus 1921, hal. 97-106

sakit masih berobat ke dukun. Dokter-dokter yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Umum tidak dipercayai masyarakat dalam menyembuhkan penyakit.¹⁴⁵

Oleh karena peran dukun sangat besar di masyarakat, PEB mengusulkan agar dukun menjadi bagian dalam Dinas Kesehatan Umum. Selain dapat menyembuhkan masyarakat melalui pengobatan tradisional, dukun hendaknya diberikan sedikit pengetahuan mengenai pengobatan modern. Karena mendapat kepercayaan masyarakat, dukun dapat memudahkan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan. Dalam hal ini dukun sebagai penghubung antara Dinas Kesehatan dengan masyarakat desa.¹⁴⁶

Kemudian PEB memandang untuk membentuk suatu komisi kesehatan bagi daerah-daerah yang terkena penyakit dan membutuhkan bantuan yang mendesak dalam memberantas penyakit. Pada umumnya penempatan dokter oleh Dinas Kesehatan Umum berada di daerah tertentu. Apabila ada suatu daerah yang terjangkit penyakit, maka Dinas Kesehatan Umum mengatakan bahwa dokter yang tersedia tidak cukup. Untuk itulah diperlukan adanya suatu komisi kesehatan.¹⁴⁷

Komisi kesehatan hanya terdiri dari satu dokter spesialis, dan dokter yang memiliki satu asisten dan sarana pembantu. Komisi ini langsung dapat bekerja pada daerah yang parah terkena penyakit. Dengan cara mencari penduduk pribumi untuk dididik menjadi pembantu umum, maka penyakit dapat dibasmi. Setelah komisi

¹⁴⁵ *Orgaan PEB*, 3 Agustus 1921, hal. 97-106

¹⁴⁶ *Ibid*, hal 97-106

¹⁴⁷ *Ibid*, hal.97-106

kesehatan pergi dari daerah tersebut, diharapkan tenaga yang sudah dididik dapat menjaga kesehatan di lingkungannya.¹⁴⁸

Setelah itu, PEB memandang perlunya diberikan pendidikan mengenai kesehatan bagi siswa disekolah dan penduduk umum. Pendidikan kesehatan mencakup pengetahuan tentang kesehatan, jenis-jenis penyakit dan sifat-sifatnya, dan cara untuk mencegah dan menanggulangi penyakit.¹⁴⁹

Terakhir, PEB memandang agar Dinas Pemberantasan Pes dibubarkan. Hal ini dikarenakan dalam bertugas, dinas ini bertindak semaunya, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Penduduk menerima perintah tanpa memahami sementara orang tidak bisa mengambil tindakan ini tanpa perantaraan pemerintah desa, yang memiliki suara untuk itu. Dinas Pemberantasan Pes bertindak tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Apabila ada rumah terjangkit pes, maka Dinas Pemberantasan Pes langsung melakukan tindakan preventif. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat. Dengan dibubarkannya Dinas Pemberantasan Pes, maka semuanya diurus oleh Dinas Kesehatan Umum.¹⁵⁰

Usulan PEB mengenai kesehatan ini mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah. Pemerintah melebur Dinas Pemberantasan Pes kedalam Dinas Kesehatan Umum. Dinas Kesehatan Umum juga menerapkan prinsip-prinsip dari Dinas Kesehatan Rakyat yang diajukan PEB. Pendidikan mengenai masalah kesehatan juga akan diberikan kepada siswa sekolah dan masyarakat umum. Komisi kesehatan juga

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 97-106

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 97-106

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 97-106

akan dikerahkan untuk menangani daerah-daerah yang cukup parah terkena penyakit. Pada umumnya pemerintah setuju dengan usulan PEB dan akan menjadikan sebagai program kerja.¹⁵¹

Dalam *Algemeene Vergadering* PEB 1923, diberitakan bahwa pemerintah telah mendirikan Dinas Kesehatan Umum untuk mencegah dan menanggulangi penyakit. Dengan dibentuknya Dinas Kesehatan Umum maka program PEB untuk mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda dapat dilaksanakan.¹⁵²

D. Organisasi Desa sebagai Sarana Propaganda PEB

Organisasi desa menurut PEB merupakan sarana yang efektif dalam mengajak penduduk pribumi untuk mendukung PEB. Organisasi desa adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat desa secara spontan. Organisasi desa biasanya dibentuk oleh para tokoh-tokoh masyarakat desa seperti bupati, kiayi, dan guru desa. Pada awalnya organisasi desa ini bersifat keagamaan. Namun semakin bertambahnya kekuatan PEB dan cabang-cabang yang dimilikinya, organisasi desa bersifat sesuai dengan adat daerahnya. Pada tahun 1927 telah terdapat banyak organisasi desa yang dibentuk oleh PEB. Diantaranya ialah: Djamiatoel Hasanah, yang memiliki banyak cabang di Jawa Barat, Soekalillah, yang terdapat di Tasikmalaya, Perkoempoelan

¹⁵¹ *Ibid.* hal. 97-106

¹⁵² *Orgaan PEB*, 9 Oktober 1924, hal. 343

Adat Minangkabau di Sumatera Barat, dan Afdeeling Boemipoetra dari PEB di Bali.¹⁵³

Organisasi desa ini dijadikan contoh oleh pemerintah dalam mencegah gerakan komunis yang semakin meluas. Pemerintah mendirikan Sarekat Hedjo sebagai organisasi desa tanpa struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, melainkan berdasarkan kepemimpinan tokoh masyarakat setempat.¹⁵⁴

Disini kita akan membahas dua perkumpulan desa bentukan PEB, Soekalillah dan Djamiatoel Hasanah. Keduanya merupakan perkumpulan yang bersifat keagamaan dan dapat memiliki pengikut yang banyak dari kalangan pribumi.

1. Perkumpulan Soekalillah

Perkumpulan ini didirikan di Tasikmalaya. Diketuai oleh Haji Sanusi, tokoh masyarakat setempat.¹⁵⁵ Tujuan didirikannya organisasi ini terutama untuk membendung gerakan nasionalis yang sedang berkembang luas.¹⁵⁶ Bagi anggotanya, organisasi ini memberikan kewajiban untuk mematuhi peraturan organisasi. Peraturan tersebut ialah:

1. Mematuhi ajaran agama Islam
2. Menghormati pemerintah

¹⁵³ *Orgaan PEB*, 15 Juli 1927, hal.237

¹⁵⁴ Kwantes. *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie* vol.8. Groningen 1978. hal. 413-420

¹⁵⁵ *Orgaan PEB*, 14 Juli 1920, hal. 84-87

¹⁵⁶ Heather Sutherland. *Op Cit*, hal.170

3. Merawat jenazah dan orang sakit
4. Mengunjungi wanita hamil
5. Saling bergotong royong, terutama ketika ada seseorang ingin mendirikan rumah, harus dibantu. Semua dilakukan dengan ikhlas.
6. Tetap menjaga adat istiadat

Peraturan ini dibuat berdasarkan kitab suci dan hadis nabi. Selain itu juga berdasarkan adat istiadat setempat. Kepengurusannya terdiri atas orang-orang yang dituakan menurut adat istiadat, bukan berdasarkan jabatan.¹⁵⁷

Organisasi ini juga memberikan bantuan kepada masyarakat berdasarkan aturan organisasi yang antara lain:

1. Membantu semua masyarakat umum, baik yang anggota maupun bukan anggota.
2. Apabila kepala adat dan pejabat pribumi wafat, organisasi ini wajib memberikan bantuan kepada keluarganya.
3. Apabila ada masyarakat yang meninggal di rumah sakit, dan keluarganya tinggal jauh dan kurang mampu, organisasi ini memberikan permohonan kepada rumah sakit agar merawat mayatnya.
4. Masyarakat dari lingkungan luar apabila meninggal di daerah organisasi bisa mendapat bantuan dari organisasi.
5. Apabila orang miskin meninggal, maka akan diberikan sumbangan kepada keluarganya.

¹⁵⁷ *Orgaan PEB*, 14 Juli 1920, hal. 84-87

6. Organisasi juga membantu dalam mendirikan mesjid-mesjid dan dalam pekerjaan membangun lingkungan tempat tinggal.¹⁵⁸

Dana yang didapat dari organisasi ini diperoleh melalui bantuan dari para pengusaha swasta, pengusaha perkebunan gula, dan juga dari kalangan pedagang yang simpati dengan organisasi ini.¹⁵⁹

2. Perkumpulan Djamiatoel Hasanah

Organisasi ini berdiri setelah organisasi Soekalillah. Organisasi ini bertempat di Garut, dan dalam perkembangannya menyebar ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada dasarnya organisasi ini sama dengan organisasi Soekalillah, yaitu sebagai organisasi bentukan PEB yang berfungsi untuk menarik simpati masyarakat.

Adapun tujuan organisasi ini antara lain:

1. Memajukan kehidupan yang baik
2. Memperbaiki hubungan ekonomi di antara rakyat
3. Memberikan bantuan pada saat kematian, pada saat kesulitan ekonomi, pada saat melahirkan, pada saat upacara keagamaan, pada saat membangun rumah, dan kegiatan yang lainnya untuk kebaikan.¹⁶⁰

Untuk membuat organisasi ini diterima masyarakat, dibentuk tenaga-tenaga propaganda yang disebar ke berbagai daerah. Tenaga propaganda tersebut umumnya

¹⁵⁸ *Orgaan PEB*, 14 Juli 1920, hal. 85-86

¹⁵⁹ *Orgaan PEB*, 14 Juli 1920, hal. 85-86

¹⁶⁰ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922, hal. 237-240

terdiri dari kiai setempat yang memiliki pengaruh di masyarakat dan juga guru yang memiliki anak didik yang banyak dan taat. Para ahli propaganda tersebut terdapat diberbagai daerah, antara lain:

1. R.H. Toifoer, ditugaskan untuk menyebarkan propaganda di Jawa Barat dan Banyumas sampai Wonosobo.
2. R. Bei Soeriodiputro, ditugaskan menyebarkan propaganda di daerah sekitar pantai utara Jawa, mencakup Pekalongan, Semarang, Rembang dan selanjutnya juga dengan Kedu.
3. M. Muhamad Jasin ditugaskan menyebarkan propaganda di daerah Yogyakarta, Surakarta, Madiun dan Kediri.
4. H. Hadjar ditugaskan menyebarkan propaganda untuk wilayah Surabaya dan Pasuruan Barat serta Madura.
5. Sjafioedin ditugaskan menyebarkan propaganda untuk wilayah Pasuruan Timur dan Besuki.

Para ahli propaganda yang bekerja di bawah mubalig ini adalah: satu orang di Banten, dua orang di Batavia, satu orang di Cirebon dan satu orang di Banyumas. Para ahli propaganda ini adalah seorang guru, di Brebes dan Pekalongan mereka memiliki banyak pengikut. Kemudian masih ada dua orang di Pekalongan. Di Priangan, para ahli propaganda melakukan tugasnya di wilayah Bandung, Cianjur, Sukabumi, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Masing-masing wilayah terdiri dari satu juru propaganda. Kemudian para juru propaganda juga bekerja di

daerah: empat orang di Semarang, tiga orang di Kedu, dua orang di Yogyakarta, satu orang di Solo, tiga orang di Madiun, tujuh orang di Kediri, tujuh orang di Surabaya, satu orang di Pasuruan, empat orang di Besuki, dan satu orang di Madura.¹⁶¹ Mereka bekerja berdasarkan perintah dari pemimpin Djamiatoel Hasanah, K. Partadiredja.¹⁶²

Luasnya daerah yang menjadi sasaran juru propaganda organisasi ini, tak heran jika organisasi ini mendapatkan banyak pengikut.¹⁶³ Para juru propaganda terjun langsung ke masyarakat. Pada umumnya mereka berpidato tentang Islam untuk menarik minat masyarakat. Setelah masyarakat merasa tertarik, kemudian mereka mengajak untuk bergabung dalam organisasi ini¹⁶⁴.

Banyaknya penduduk yang masuk menjadi anggota dari organisasi-organisasi bentukan PEB ini tak lepas dari tujuan umum organisasi. Tujuan tersebut adalah:

- a. Membangkitkan kerjasama dan tolong-menolong di antara penduduk desa dalam peristiwa kematian, dalam kasus orang sakit, dalam berbagai kesulitan yang melibatkan proyek besar, dalam pembangunan dan perpindahan rumah dan lumbung padi, dalam menggarap sawah dan sebagainya;
- b. Memperbaiki mentalitas rakyat dengan memperkuat saling kesepakatan, dengan menonjolkan rasa kebersamaan di desa, dengan mengadakan musyawarah di mana tulisan-tulisan yang baik dibacakan atau ceramah diadakan oleh para

¹⁶¹ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922, hal. 237-240

¹⁶² *Oetoesan Hindia*, 19 September 1922

¹⁶³ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922, hal. 241-242. Mengenai nama-nama mobalig dan daerah sasaran propaganda dapat dilihat dalam lampiran. Demikian juga mengenai keberadaan Soekalillah Djamiatoel Hasanah di berbagai daerah pada tahun 1921.

¹⁶⁴ *Neratja*. 16 Juli 1921

petugas kita dan oleh orang lain. Pembicaraan membahas persoalan agama, persoalan adat dan pemberian nasehat di bidang pertanian, peternakan dan kerajinan.¹⁶⁵

Organisasi desa bentukan PEB ini banyak mendapat tentangan dari kaum pergerakan nasional maupun dari golongan kiri. Terutama organisasi Djamiatoel Hasanah. Dalam surat kabar *Neratja* diberitakan bahwa para juru propaganda PEB masuk kedesa-desa untuk memberikan ceramah agama. Dalam ceramah tersebut dikatakan tentang jalan keselamatan, yaitu jalan untuk bahagia dunia akhirat. Jalan tersebut dapat dipelajari melalui Djamiatoel Hasanah. Kemudian para juru propaganda mengajak penduduk bergabung dalam Djamiatoel Hasanah tanpa membayar iuran apapun. Dalam ceramah yang diberikan juru propaganda itu terdapat satu orang dari golongan nasionalis yang curiga kepada mereka. Ia menganggaap bahwa dana dari Djamiatoel Hasanah berasal dari PEB. Para penduduk disuruh bergabung dalam Djamiatoel Hasanah agar dapat menjadi pendukung PEB.¹⁶⁶

Dalam harian *Sinar Hindia* juga diberitakan mengenai Djamiatoel Hasanah. Agama Islam melalui Djamiatoel Hasanah dijadikan kedok oleh PEB untuk memperluas pengaruhnya di masyarakat. Menurut *Sinar Hindia*, keberadaan Djamiatoel Hasanah menjadikan laju pergerakan nasional menjadi terhambat. Perkumpulan yang bersifat nasionalis menjadi lemah bahkan tidak mampu beroperasi karena pengaruh dari Djamiatoel Hasanah. Djamiatoel Hasanah sanggup memecah-

¹⁶⁵ *Orgaan PEB*, 18 Oktober 1922, hal. 237-240

¹⁶⁶ *Neratja*, 16 Juli 1921

belah pergerakan bumiputera karena didukung oleh orang-orang yang berkuasa dan mempunyai harta.¹⁶⁷

Seperti telah dijelaskan diatas, organisasi desa ini merupakan sarana yang efektif dalam mencari dukungan bagi PEB. Dengan programnya yang memberikan tunjangan kematian bagi masyarakat dan didukung dana yang kuat, banyak masyarakat yang tertarik dan bergabung dalam organisasi ini. Dengan banyaknya anggota, maka tak heran apabila organisasi lain yang bersifat nasionalis menjadi kehilangan pengaruhnya dan kemudian melemah.

E. Hubungan PEB dengan kaum Priyayi

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, keanggotaan PEB antara lain terdiri dari para pemuka agama (kiai) dan bupati. Mengenai peranan kiayi sudah dibahas diatas. Dengan beranggotakan bupati, PEB mengharapkan akan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat sekitar. Sebagai partai penganjur asosiasi yang konservatif, PEB memandang bupati sebagai sekutunya yang wajar. PEB mengandalkan dukungan bupati di dalam *Volksraad*, dan sebagai imbalan, PEB mempertahankan jabatan dan kedudukan para bupati di masyarakat. Selain itu, banyak pejabat *Binnenland Bestuur* (BB) yang juga mendukung PEB.¹⁶⁸ Dalam *orgaan* PEB dituliskan bahwa:¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Sinar Hindia*, 5 Des. 1922

¹⁶⁸ Heather Sutherland. *Op Cit*, hal.175

¹⁶⁹ *Orgaan PEB*, 14 Juli 1920, hal. 84

“Bupati memandang perlu untuk segera mengirimkan pesan yang tepat dan tenang kepada rakyat ketika melihat gambaran persoalan ini. Untuk itu setiap orang ikut bekerjasama membujuk para pejabat dan orang-orang swasta yang melihat bagaimana racun kecurigaan beredar dalam kehidupan rakyat. Setiap orang bisa berusaha memberikan suntikan untuk mencegah penularan kumat revolusi. Jelas pertimbangan diperlukan apabila ditemukan intelektual pribumi yang tenang dan patuh, khususnya dibebani bagi pekerjaan ini. Tidak mudah untuk menerima tugas demikian. Pilihan perintis perlu dilakukan dengan sangat cermat.

Selain bupati tersebut, masih ada beberapa tokoh masyarakat lain yang terbukti merasa cocok dengan dinas penerangan ini. Tugas itu bisa disamakan dengan seorang guru sekolah rakyat, yang cukup maju dan berpengalaman untuk meyakinkan rakyat terhadap dugaan dari pihak yang salah dengan bukti-bukti, bahwa pemerintah memiliki tujuan mulia. Karya ini juga harus bersifat damai, agar lebih mudah saling mendekatkan antara orang Eropa dan pribumi. Di antara orang-orang Eropa, banyak koreksi yang dilakukan dalam penilaian mereka terhadap orang pribumi. PEB harus melakukan itu (pengurus dan anggotanya), para tutor pribumi bisa melakukan karya koreksi ini ke pihak pribumi. Jadi karya itu dimulai: dinas informasi yang tenang.”

Demikian juga halnya dengan para bupati. Mereka berpendapat bahwa ide-ide mereka lebih baik diwakili oleh partai-partai yang didalamnya terdapat golongan Eropa dan berdasarkan atas prinsip asosiasi.¹⁷⁰ Para bupati ini telah lama hidup berdampingan dengan budaya Eropa, sehingga kehidupannya telah dipengaruhi oleh budaya tersebut. Para bupati tersebut dijadikan alat untuk membantu pemerintah kolonial agar pemerintah dapat diterima oleh rakyat.¹⁷¹

Besarnya komitmen para bupati untuk PEB sangat beragam. Tapi keikutsertaan mereka dalam *volksraad*, telah menjadikan mereka juru bicara pribumi yang moderat.¹⁷² Pada 1926, Heather Sutherland menyebut bahwa PEB telah menjerat para bupati untuk ikut dalam partainya, terutama di Jawa Timur. Dikatakan bahwa bupati

¹⁷⁰ Robert Van Niel. *Op. Cit*, hal. 219.

¹⁷¹ *Ibid.* hal. 219

¹⁷² Heather Sutherland. *Op. Cit*, hal.178

Blora adalah sebagai seorang penghubung antara para bupati dengan PEB. Para bupati yang bergabung dengan PEB itu antara lain:¹⁷³

- PTA Koesoemo Joedo (bupati Ponorogo)
- RAA Soeria Karta Legawa (bupati Garut, 1915-1929)
- RMA Pandji Ario Dinoto (bupati Cirebon, 1920-1928)
- RT Notohadisoerjo (bupati Banyuwangi, 1919-1934)
- RT Said (bupati Blora, 1913-1926)
- RAA Poerbonegoro (bupati Trenggalek, 1909-1933)
- PA Sosrohadiningrat (bupati Tulungagung, 1907-1943)
- RAA Soeria Adiningrat (bupati Jombang, 1910-1930)
- RAA Nitinegoro (bupati Probolinggo, 1916-1930)
- Hadiwinoto (bupati Magetan)

Selain itu juga terdapat dua wedana R Sadjiroen dan R Sosromadiwidjojo dan juga satu inspektur pendidikan R Kamil yang keluar dari PEB pada tahun 1922. Ia keluar dari PEB dikarenakan PEB menyerahkan petani Jawa kepada raja-raja gula dan menelantarkan pendidikan pribumi.¹⁷⁴ Sedangkan Koesoemo Joedo, Soeria Karta Legawa, Pandji Ario Dinoto, Notohadisoerjo, dan Said merupakan bupati yang duduk dalam *Volksraad* mewakili PEB antara periode 1921-1931.¹⁷⁵

¹⁷³ Heather Sutherland. *Pangreh Pradja, Java's Indigenous Administrative Corps and Its Role in the Last Decades of Dutch Colonial Rule*. Yale, 1973. hal. 370-371

¹⁷⁴ Hans van Miert. *Op Cit.* hal. 338. Lihat juga *Neratja*, 19 Desember 1922. Diberitakan dalam sidang *Volksraad* R. Kamil mengatakan PEB mendapat bantuan dari konglomerat gula dan tidak memberikan pendidikan kepada bangsa bumiputera.

¹⁷⁵ Heather Sutherland. *Pangreh Pradja, Java's Indigenous Administrative Corps and Its Role in the Last Decades of Dutch Colonial Rule*. Yale, 1973. hal. 370-371

Dengan mengandalkan bupati sebagai orang terdepan dalam menghambat laju pergerakan nasional, maka semakin tampaklah PEB sebagai partai yang bertentangan dengan golongan nasionalis.¹⁷⁶

F. Pertentangan PEB dengan golongan Komunis

Sejak berdirinya PEB telah mendapatkan banyak tentangan dari kaum nasionalis maupun komunis. Sebagai partai asosiasi beraliran kapitalis maka pertentangan dengan komunis pun tak bisa dihindari. Untuk melindungi pemilik modal dari agitasi komunis, PEB memberlakukan kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan komunis. Pertentangan PEB dengan komunis berakhir setelah terjadi pemberontakan PKI 1926 dan 1927. Setelah terjadi pemberontakan komunis, PEB mengecam dengan keras aksi tersebut, dan membuat kebijakan untuk menyadarkan masyarakat dari pengaruh komunis. Berikut akan dibahas mengenai pertentangan PEB dengan komunis.

Dalam *orgaannya*, PEB menjelaskan tentang cara-cara dalam membendung gerakan kaum komunis di masyarakat. Dijelaskan bahwa para pemilik modal (pengusaha perkebunan, pengusaha gula) harus mampu melawan agitasi komunis. Dengan semboyan komunis yang berbunyi: “lawan gula yang terkutuk, gulingkan pemerintahan, ganggu keamanan dan rubah struktur sosial”.¹⁷⁷ Semboyan tersebut telah menimbulkan bentuk perlawanan terhadap kaum kapitalis. Untuk itu para

¹⁷⁶ *Ibid.* hal. 370-371

¹⁷⁷ *Orgaan PEB*, 28 Juli 1920, hal. 112-115

pengusaha harus mampu berjuang untuk menahan laju komunis yang semakin berkembang di masyarakat.

Perlawanan yang dilakukan komunis terhadap PEB mencakup berbagai bidang. Dalam *Sinar Hindia* diberitakan bahwa PEB merupakan kepanjangan dari *Pantjen Edan-edanan Banget*. (PEB sebagai partai politik yang edan atau gila sekali).¹⁷⁸

“Kaoem pertengahan djangan enak-enak memikirkan kekadja’annja sendiri sahadja, dengan doeodek bergojang-gojang di koersi seanak bininja sambil mengisap seroeote. Tetapi ingat-ingat, djangan sekali-kali mendirikan perkoempoelan Pantjen Edan-edanan Banget”

Sinar Hindia juga memberitakan bahwa PEB menggunakan modal besar (uang) untuk menjadikan penduduk menjadi pengikutnya. Pembesar-pembesar Eropa dan Bumiputera banyak yang membantu PEB. Bahkan surat kabar *Kaoem Moeda* yang tadinya merupakan *orgaan* pergerakan telah menjadi *orgaan* PEB.¹⁷⁹ Surat kabar *Kaoem Moeda* tadinya merupakan *orgaan* dari Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh Abdul Moeis.¹⁸⁰

Kaum komunis juga menyerang PEB dengan menulis artikel berjudul “Igama Islam dan PEB”. Artikel tersebut antara lain menuliskan:¹⁸¹

“Tidak mengherankan Djamiatoel Hasanah dll, itoe pada dahoeloe kala, semendjak baroe-baroean memancarkan sinarnja karena kesalahan kita jang tidak soeka memfikirkan lebih landjoet hal itoe, laloe kita telan sadja, akan tetapi apa kabar? Pergerakan lalu mendjadi kendor karenanja, ternjata djoega beberapa politiek atau vak vereenigening menjadi setengah ataoe mati sama sekali lantaran pengaroehnja

¹⁷⁸ *Sinar Hindia*, 4 Des 1922. *Sinar Hindia* merupakan surat kabar yang dikelola PKI. Dengan Semaoen sebagai direktur dan Darsono sebagai redaktur. Surat kabar ini berpusat di Semarang. Dalam surat kabar ini banyak terdapat artikel mengenai pertentangan PEB dengan kaum komunis.

¹⁷⁹ *Sinar Hindia*, 9 Des 1922.

¹⁸⁰ A. P. E. Korver. *Op Cit*, hal. 67

¹⁸¹ *Sinar Hindia*, 14 Okt 1922.

itoe. ... Sebenarnja Igama Islam disini diperhatikan benar-benar oleh pihak sana oentoek sendjata politiek goena memetjah-melebekan pergerakan Boemipoetra, sedang pergerakan itoe mendapat bantoean dari orang-orang jang koeat, pandai, koeasa, dan berharta...”

Dijelaskan bahwa PEB memakai agama Islam dalam mencari dukungan masyarakat. Melalui organisasi Djamiatoel Hasanah PEB telah berhasil membuat organisasi pergerakan menjadi lembek. Dengan bantuan modal, Djamiatoel Hasanah berhasil mengajak masyarakat untuk mendukung PEB. Mengenai keanggotaan PEB dalam *Volksraad* juga menjadi kritikan kaum komunis. Dalam *Sinar Hindia* diberitakan bahwa *Volksraad* hanya memperjuangkan kepentingan PEB saja, tidak untuk kepentingan masyarakat. Undang-undang yang dibuat *Volksraad* berdasarkan kepentingan PEB, karena memiliki anggota terbanyak dalam *Volksraad*.¹⁸² Para bupati yang menjadi anggota PEB juga menjadi kecaman PKI. Para bupati bersedia menjadi anggota PEB dikarenakan PEB sanggup mempertahankan kedudukan para bupati. Bupati sebagai pemimpin rakyat, tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyatnya, melainkan berjuang untuk kepentingan sendiri dengan cara bergabung dengan partai kapitalis Eropa.¹⁸³

1. Kebijakan PEB dalam membendung agitasi Komunis

PEB sebagai partai yang terdiri dari kaum pengusaha sering mendapat kecaman dari kaum komunis. Orang-orang komunis melancarkan aksinya dengan

¹⁸² *Sinar Hindia*, 12 Des 1922

¹⁸³ *Sinar Hindia*, 23 Nov 1922

melakukan pemogokan di perusahaan-perusahaan milik pengusaha. Mereka menuntut agar ada peningkatan kesejahteraan kehidupan.

Untuk melawan gerakan komunis tersebut, PEB menyerukan kepada para pengusaha untuk bersatu membuat gerakan tandingan melawan komunis. Salah satunya adalah PEB. Menurut PEB para pengusaha harus memiliki kedekatan dengan para pekerjanya. Dengan hubungan yang dekat para pekerja merasa nyaman dalam bekerja. Untuk mencegah demonstrasi dan pemogokan, para pengusaha harus menguasai sumber pasokan ekonomi. Umumnya pemogokan terjadi karena tuntutan ekonomi. Apabila pengusaha menguasai pasokan ekonomi, pengusaha dapat menggunakannya untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerjanya. Dalam *orgaan* PEB diberitakan bahwa:¹⁸⁴

“...Kini faktor politik dalam gerakan itu setidaknya bisa melemahkan anda, tetapi sumber pasokan ekonomi harus anda kuasai. Tindakan ketiga yang sesuai adalah: rampaslah sumber daya ekonomi mereka dan buktikan apakah masih ada alasan lain untuk bergerak, setidaknya merupakan ciri khasnya. Perlawanan itu berbunyi: selalu orang bisa mengajukan tuntutan ekonomi disini dan dengan demikian aksi massa memiliki alasan karena motivasi ekonomi.”

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, PEB melakukan kebijakan seperti berikut ini:

1. Memberikan upah minimum dan tunjangan khusus yang disesuaikan dengan standar kehidupan.
2. Memberikan ganti rugi minimum karena kegagalan panen.
3. Gaji pegawai tetap dibayar meskipun pabrik tidak bekerja.

¹⁸⁴ *Orgaan PEB*, 28 Juli 1920, hal. 112-115.

4. Apabila pegawai bekerja pada hari libur, upahnya akan dinaikkan dua kali lipat.
5. Pegawai mendapatkan jatah cuti empat belas hari per tahun dengan gaji tetap dibayar.
6. Usia pensiun 40 tahun, dengan rata-rata *f*15 dalam sebulan sebagai batas minimum.
7. Bagi hasil keuntungan antara perusahaan dengan pekerja dalam bentuk pemberian tunjangan.
8. Memberikan pelayanan kesehatan gratis dan mendirikan klinik kesehatan.
9. Mencarikan penengah (aparatus hukum) untuk mengatasi masalah yang sulit diselesaikan antara pekerja dengan pengusaha.¹⁸⁵

PEB juga berpendapat agar para pekerja membentuk organisasi kerja (sarekat kerja) di perusahaan. Organisasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Organisasi ini sebagai sarana bagi perusahaan untuk mensejahterakan pekerja. Perusahaan melalui organisasi dapat mendirikan pasar murah untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Selain itu juga disediakan fasilitas kredit dan pinjaman.¹⁸⁶

Dalam bidang pertanian dan perkebunan PEB memandang perlu untuk membantu petani pribumi. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan dalam pemilihan dan pembelian bibit padi. Juga diusahakan untuk memberikan bajak

¹⁸⁵ *Orgaan PEB*, 28 Juli 1920, hal. 112-115

¹⁸⁶ *Orgaan PEB*, 28 Juli 1920, hal. 112-115

motor bagi para petani. Apabila petani mencapai panen yang memuaskan maka para pengusaha perkebunan juga mendapatkan hasil yang memuaskan.¹⁸⁷

Dengan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja dan petani pribumi diharapkan pemogokan tidak terjadi. Apabila kebijakan ini dijalankan setiap perusahaan, maka agitasi komunis tidak akan mempan dalam menghasut para pekerja.

2. Tanggapan PEB mengenai pemberontakan Komunis 1926 dan 1927

Aksi-aksi yang dilancarkan kaum komunis berujung pada pemberontakan yang dilakukan di Jawa dan Sumatera pada tahun 1926 dan 1927. Aksi tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, baik dari golongan pergerakan maupun konservatif. PEB termasuk salah satu yang mengecam keras tindakan komunis tersebut. Kecaman PEB disampaikan melalui pidato-pidato dalam *Volksraad*.

Berdasarkan pidato J. J. Schrieke anggota PEB (menjabat sebagai perwakilan pemerintah untuk menangani masalah-masalah umum) dalam *Volksraad*. Dijelaskan mengenai aksi pemberantasan komunis dan pencegahan pengaruh komunis di masyarakat oleh PEB:¹⁸⁸

“Dengan penuh rasa hormat saya meminta perhatian Yang Mulia pada hal tersebut dibawah ini. Sejak Agustus 1924 gerakan komunisme, atas perintah penguasa telah mengambil tindakan kebijakan yang tajam dan merubah jalannya ketentuan-ketentuan larangan dan aturan-aturan lainnya. Jika sesegera mungkin diambil tindakan maka dapat dilihat seberapa besar manfaat dari sana dapat dinantikan sehubungan

¹⁸⁷ *Orgaan PEB*, 4 Agustus 1920, hal. 123-124

¹⁸⁸ *Kwantes. Op. Cit*, hal. 413-420

dengan ajaran asing yang dimaksud dan kebijakan dari penyebarannya, hal ini jelas, sebelum lebih jauh lagi, dengan alasan apapun, mendapat simpati dari kelompok-kelompok pribumi. Gerakan pemberantasan yang memungkinkan adalah dengan mengerahkan kekuatan pribumi.”

Untuk memberantas gerakan komunis harus dilakukan dengan mengerahkan kekuatan pribumi. Kekuatan pribumi dapat berupa organisasi-organisasi desa. Organisasi desa ini bermacam bentuknya. Di Jawa Barat organisasi ini bersifat keagamaan. Di Blora dan Magetan, bupatinya mendirikan perkumpulan yang mengarah kepada penggalakan kepentingan ekonomi yang banyak diminati masyarakat. Organisasi desa ini efektif dalam menarik simpati masyarakat. Dengan demikian pengaruh komunis dapat dihilangkan dari masyarakat. Supaya hasil yang dicapai dapat maksimal, maka PEB mengharapkan agar para pemimpin daerah juga untuk memberikan bantuannya terhadap organisasi desa.¹⁸⁹

Dalam *orgaan* PEB juga dijelaskan mengenai sikap PEB terhadap pemberontakan komunis:¹⁹⁰

“Pemerintah bersedia dan siap melindungi penduduk dari intimidasi dan teror dari pihak agen-agen Bolshewik. Kaum komunis ternyata tidak begitu mempedulikan kepentingan penduduk tetapi dengan melakukan perlawanan umum, mereka mencoba mencapai tujuan yang berada di luar kepentingan penduduk, di mana dalam perjuangan itu suatu tujuan yang berada di Barat dan bukan di Timur. Demikian kata Gubernur Jenderal. Kini kita akan memperhatikan apa yang dinyatakan oleh pemerintah. Pemerintah sanggup dan siap melindungi kita. Ini merupakan kata yang menjanjikan. Siap! Bukan hanya sanggup tetapi juga siap. Ini merupakan tugas berat.”

Disini PEB meminta jaminan pemerintah bahwa pemerintah siap melindungi masyarakat dari pemberontakan komunis. PEB juga mengkritik sifat pemerintah (Gubernur Jendral) yang memberikan grasi (pemberian ampunan) kepada para

¹⁸⁹ *Ibid.* hal. 413-420

¹⁹⁰ *Orgaan PEB*, 31 Mei 1927, hal. 187-194

pemimpin komunis yang melakukan pemberontakan. Menurut PEB pemberian grasi dilakukan dengan tujuan politik, bukan untuk menegakkan hukum. Dengan adanya grasi pemerintah mengharapkan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pemerintah berharap agar masyarakat memandang pemerintah penuh dengan belas kasih. PEB menganggap pemberian grasi tidak seharusnya dilakukan. Untuk menegakkan hukum diperlukan tindakan tegas dari pemerintah. Pemberian grasi tidak mencerminkan adanya ketegasan dari pemerintah.¹⁹¹ PEB meminta ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam memberantas pemberontakan komunis. Selain itu PEB juga meminta pemerintah melindungi masyarakat dari bahaya yang diakibatkan oleh komunis.

G. Kemunduran PEB

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, PEB mengalami kemunduran yang cukup signifikan setelah tahun 1929. Pada periode volksraad 1931-1942, keanggotaan PEB dalam volksraad menjadi hanya satu orang saja dari golongan timur asing (Yo Heng Kam). Kemunduran PEB sudah terlihat sejak tahun 1929. Berikut penyebab kemunduran PEB:

1. Kepulangan pemimpinnya (A. J. N. Engelenberg) ke Belanda pada tahun 1928.¹⁹² Seperti telah diketahui, PEB adalah partai yang bergantung pada sosok pimpinan. Dalam pemilihan ketua umum, Engelenberg menjadi

¹⁹¹ *Orgaan PEB*, 31 Mei 1927, hal. 187-194

¹⁹² A. K. Pringgodigdo. *Op. Cit*, hal. 15

sosok yang tak tergantikan. Selepas pemimpinnya pulang, partai ini mengalami kemunduran.

2. Berdirinya *Vaderlandsche Club* (VC) pada tahun 1928. Setelah kepulangan pemimpinnya, banyak anggota PEB yang pindah ke VC.¹⁹³

VC merupakan partai politik asosiasi yang sealian dengan PEB. Anggotanya terdiri dari orang Eropa yang konservatif. Tujuannya mempertahankan Hindia Belanda dalam ikatan negeri Belanda. Pada *Volksraad* 1931 VC menempatkan anggotanya sebagai yang terbanyak dalam *Volksraad*.¹⁹⁴ Dengan demikian pengaruh PEB sudah mulai tergantikan dengan keberadaan VC.

3. Menurunnya produksi dan keuntungan dari gula pada tahun 1930.¹⁹⁵ Seperti telah diketahui PEB mendapatkan dukungan dari para pengusaha gula. Dengan turunnya keuntungan maka dukungan yang diberikan kepada PEB menjadi berkurang.

4. Semakin radikalnya pergerakan nasional. Kaum nasionalis sudah tidak percaya lagi terhadap *Volksraad*. Mereka berjuang sendiri dengan mendirikan perhimpunan-perhimpunan dan perkumpulan politik.

Mengenai pembubaran PEB tidak terdapat sumber yang memadai. Namun, berdasarkan tabel keanggotaan dalam *Volksraad*, PEB tetap ada di Hindia Belanda

¹⁹³ *Orgaan PEB*, 1929

¹⁹⁴ Van der Wall. *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlands-Indie*. Groningen: J.B Wolter, 1964 dan 1965. hal. 690-693

¹⁹⁵ M. C. Ricklef. *Op. Cit*, hal. 231

sampai tahun 1942.¹⁹⁶ Selepas tahun 1929, kegiatan-kegiatan yang dilakukan partai ini tidak lagi memiliki pengaruh dalam masyarakat. Selain itu juga terjadi penurunan anggota dalam partai ini.



¹⁹⁶ Van der Wall. *Op. Cit*, hal.690-693